

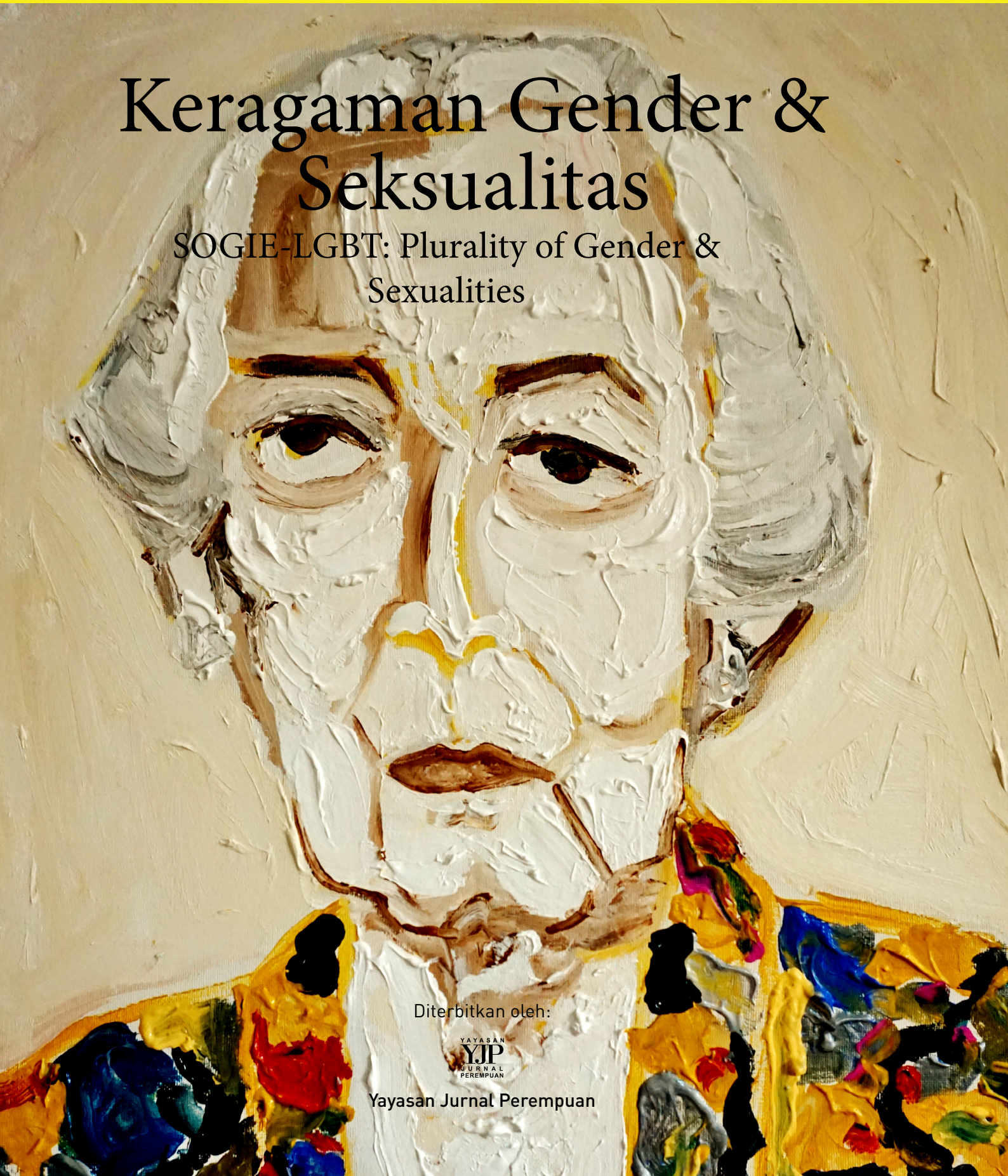
Keragaman Gender & Seksualitas

SOGIE-LGBT: Plurality of Gender &
Sexualities

Diterbitkan oleh:

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

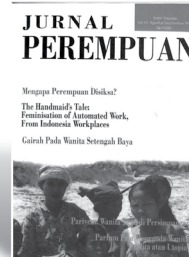
Yayasan Jurnal Perempuan



Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp.9200,- Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya beroleh kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 sahabat Jurnal Perempuan. Gabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp. 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan dan Jurnal Perempuan Muda secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

- BCA KCP Menteng a.n Gadis A. Effendi, No. Rekening: 7350454416

- Bank Mandiri cabang Tebet Raya a.n Yayasan Jurnal Perempuan, No. Rekening 124-00-0497988-7

(Mohon bukti transfer difaks ke 021 83706747, attn: Andri Wibowo/Gerry)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org

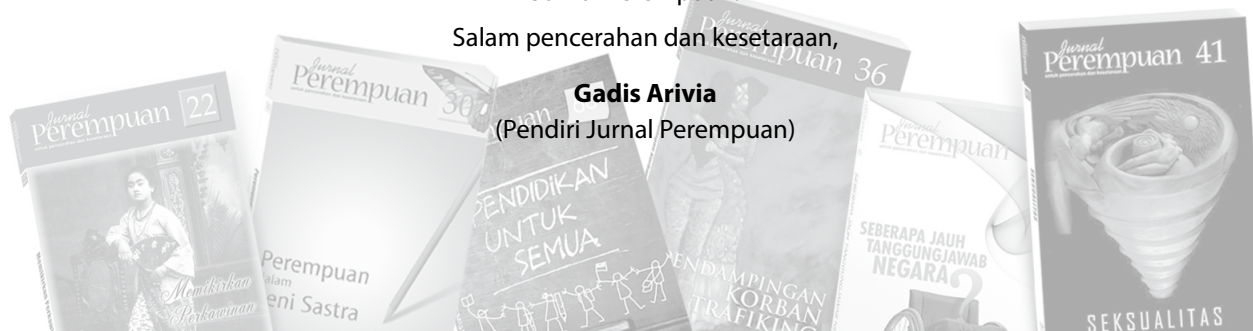
Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Mariana Amiruddin (Hp 08174914315, email: mariana@jurnalperempuan.com) dan Deedee Achriani (Hp 0818730289, email: deedee@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada setiap tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)

Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)

Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)

Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)

Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

SEKRETARIS REDAKSI

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo
Hasan Ramadhan
Abby Gina Boangmanalu

DESAIN & TATA LETAK

Agus Wiyono

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Lontar No. 12 - Menteng Atas,
Setiabudi - Jakarta Selatan 12960
Telp. (021) 8370 2005 (hunting)
Fax: (021) 8370 6747
Email: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, November 2015



FORDFOUNDATION

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan: Mengapa SOGIE (<i>Sexual Orientation, Gender Identity and Expression</i>)?.....	iii
Artikel / Articles	
• Selarung Gerakan Lesbian dalam Epidemi Kebencian: Awal Advokasi SOGIE (<i>Sexual Orientation, Gender Identity and Expression</i>) di Nusantara / <i>Plurality of Lesbian Movements under Hatred-Epidemic: Initiation of SOGIE Advocacy in Nusantara</i>	269-288
<i>BJD. Gayatri</i>	
• Diri, Tubuh dan Relasi: Kajian atas Transgender FTM (<i>Female to Male</i>) di Jakarta / <i>Self, Body, and Relation: a Study of FTM Transgender in Jakarta</i>	289-302
<i>Sri Agustine, Evi Lina Sutrisno & Dewi Candraningrum</i>	
• "Mengapa Saya Mendirikan Suara Kita?" Sebuah Memoar / "Why I founded Our Voice": a Memoir	303-308
<i>Hartoyo</i>	
• Penyebab atau Penyembuh? Kekerasan Seksual terhadap Lesbian, Biseksual, dan Transgender <i>Female-to-Male</i> di Indonesia / <i>Causes or Cures? Sexual Violence against Lesbian, Bisexual and Transgender Female-to-Male in Indonesia</i>	309-314
<i>Ayu Regina Yolandasari</i>	
• Razia terhadap LGBT sebagai Agenda Moralitas Palsu: Kajian Pemberitaan Media di Indonesia / <i>Raids against LGBT as Fake Moral Agenda: a Study on News Media in Indonesia</i>	315-320
<i>Sari Andajani, Dinar Lubis & Sharyn Graham-Davies</i>	
• Politik Gender dan Seksualitas: Transgender Indonesia dalam Konteks Masyarakat Indonesia dan Eropa Barat / <i>Gender Politics and Sexuality: Indonesian Transgender in the Context of Indonesia and Western Europe Society</i>	321-327
<i>Tanti Noor Said</i>	
• Memetakan Tubuh, Gender, dan Seksualitas dalam Kajian Queer / <i>Mapping Body, Gender, and Sexuality in Queer Studies</i>	329-338
<i>Hendri Yulius Wijaya</i>	
• Hak Asasi Manusia LGBT dalam Kebijakan Dalam Negeri Indonesia / <i>LGBT's Human Rights in the Indonesian Interior Policies</i>	339-355
<i>Yulianti Muthmainnah</i>	
• LGBT, Agama dan HAM: Kajian Pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl / <i>LGBT, Religion, and Human Rights: a Study on Khaled M. Abou El-Fadl's Thoughts</i>	357-366
<i>Masthuriyah Sa'dan</i>	
• "Makna Hidup" Bagi LGBT Ketika Negara Abai: Kajian Queer di Jakarta / "Meaning of Life" for LGBT when State Ignores: a Queer Study in Jakarta.....	367-376
<i>Gadis Arivia dan Abby Gina</i>	
Wawancara / Interview	
• David Kloos: "Perempuan Konservatif Mendominasi Formasi Kepemimpinan" / <i>David Kloos: "Conservative Women dominate Formation of Leadership"</i>	377-381
<i>Saras Dewi</i>	
Kata dan Makna / Words and Meanings	383-385
Profil / Profile	
• Hana Salomina Hikayobi: "Terpanggil untuk Menyuarakan Kaum Tak Bersuara" / <i>Hana Salomina Hikayobi: "Compelled to voice the Voiceless"</i>	387-392
<i>Dewi Candraningrum & Anita Dhewy</i>	
Resensi Buku/ Book Review	
• Tombois dan Femmes: Menantang Label Gender di Padang / <i>Tombois and Femmes: Against Gender Label in Padang</i>	393-395
<i>Nadya Karima Melati</i>	
Tokoh / Heroine	
• Tunggal Pawestri: "Dukungan Terbuka terhadap LGBT akan Mengundang Dukungan Yang Lain" / <i>Tunggal Pawestri: "Open Support for LGBT invite Other Support"</i>	397-404
<i>Anita Dhewy</i>	

Mengapa SOGIE (*Sexual Orientation, Gender Identity and Expression*)?

Komisi Internasional tentang Hak Asasi LGBT (*The International Gay and Lesbian Human Rights Commission* (IGLHRC)) merupakan sebuah organisasi non-pemerintah yang penting dalam menangani dan mengadvokasi isu pelanggaran HAM berbasis SOGIE (*sexual orientation, gender identity and expression*) ke PBB dan berbagai badan internasional lainnya. Organisasi ini tercatat dalam ESOSOC dan menjadikan organisasi untuk konsultasi yang dipercaya PBB, yang didirikan pada tahun 1990 oleh Julie Dorf di San Francisco. IGLHRC juga berkontribusi pada pembuatan Prinsip-Prinsip Yogyakarta (*Yogyakarta Principles*) di tahun 2010. Prinsip-prinsip Yogyakarta adalah prinsip-prinsip legal internasional mengenai orientasi seksual, identitas gender dan Undang-Undang internasional telah disampaikan kepada PBB dan pihak pemerintah dalam upaya memastikan keberadaan universal perlindungan HAM. Kelompok yang terdiri dari 29 ahli HAM internasional hari itu mengeluarkan pernyataan mengenai Prinsip-Prinsip Yogyakarta mengenai Aplikasi Undang-Undang HAM Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender.

Prinsip-Prinsip tersebut menegaskan standar legal mengikat yang wajib dipatuhi oleh semua Negara. Prinsip-prinsip tersebut diadopsi oleh sekumpulan ahli dalam bidang Undang-Undang internasional dalam suatu pertemuan yang diselenggarakan di Yogyakarta, Indonesia. Anggota kelompok ahli tersebut terdiri dari mantan Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, ahli independen PBB, anggota dan mantan anggota lembaga perjanjian HAM, hakim, akademisi dan pembela HAM. Dalam pengantar aksinya hal 6 dinarasikan: "Kita semua memiliki kesamaan hak asasi manusia. Apapun orientasi seksual, jenis kelamin, identitas gender, kebangsaan, ras/etnisitas, agama, bahasa dan status lain yang kita

sandang, kita semua memiliki hak-hak asasi manusia (HAM) tanpa boleh disertai dengan diskriminasi". Pada aksi tersebut diakui dengan jelas keberadaan HAM atas dasar SOGIE.

Seringkali bias kekerasan atas dasar SOGIE dikarenakan mereka dituduh sebagai perihwal baru dan 'barat', yang pada kenyataannya dalam struktur tradisional masyarakat mana pun, akan dapat ditemui dengan mudah eksistensi individu atau kelompok yang memiliki keberagaman gender dan seksualitas. Di Indonesia, di kalangan komunitas Bugis misalnya, bahkan dikenal setidaknya ada lima gender yang berbeda. Yang analog sama adalah *oroane* (laki-laki) dan *makkunrai* (perempuan), dan tiga lainnya disebut sebagai *bissu*, *calabai*, dan *calalai*. *Bissu* mewakili aspek perempuan dan laki-laki, yang menjadi pemimpin spiritual setelah naik haji. *Calabai* mewakili aspek terlahir sebagai laki-laki dan kemudian menjadi perempuan.

Sedang *Calalai* mewakili aspek yang terlahir sebagai perempuan dan kemudian menjadi laki-laki. Di samping tuduhan tersebut, tuduhan yang kerap ada adalah sebutan "sakit jiwa" atas dasar SOGIE mereka, padahal WHO, organisasi kesehatan dunia, telah menyatakan bahwa LGBT bukan fenomena sakit jiwa melainkan varian biasa dari seksualitas manusia.

Kini kita sudah memasuki era komunitas LGBTIQ (*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex, Queer*) yang eksis dan berperan di dalam masyarakat. Namun masalahnya apakah komunitas LGBTIQ telah terrepresentasi secara adil di media? Kevin Barnhurst dalam bukunya berjudul "Media Queered" (2007), menjelaskan bahwa komunitas LGBTIQ telah lama dibungkam di media. Ia mengadvokasi perlunya visibilitas komunitas LGBTIQ di media agar memperlihatkan masyarakat yang plural. Media *mainstream* masih terjebak antara "menertawakan"

kecirian LGBTIQ atau “mengeksotiskan” dan bahkan kadang digambarkan sebagai “predator”. Padahal apa yang perlu dilakukan media adalah memperlihatkan adanya cara berada yang berbeda, unik dan sekaligus mentransformasikan perubahan dan mengikis homofobia (kebencian & ketakutan pada kalangan homo). Kritik terhadap media diperlukan agar media sadar atas ketidakadilan yang terjadi dan ikut memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan yang mencerahkan. Sesungguhnya tujuan utama dari sensitivitas media terhadap LGBT adalah untuk membangun dialog antara media dan komunitas LGBT dalam menegakkan HAM. Untuk itulah JP Edisi 87 ini diterbitkan.

Dalam bukunya *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity* (London: Routledge, 1999), Judith Butler menarasikan bahwa “Cultural configurations of sex and gender might then proliferate or, rather, their present proliferation might then become articulable within the discourses that establish intelligible cultural life, confounding the very binarism of sex, and exposing its fundamental unnaturalness. What other local strategies for engaging the ‘unnatural’ might lead to the denaturalization of gender as such?” (hal 190). Butler melemparkan kemungkinan yang melampaui binerisme, pada sesuatu yang kemudian manusia biasa menyebutnya sebagai alamiah. Teori Queer merupakan salah satu persebaran dari teori-teori kritis pos-strukturalis yang lahir pada tahun 1990-an dan disokong secara kuat dalam filsafat feminisme. Di samping Butler, teori ini juga dibangun oleh nama-nama seperti Monique Wittig, Teresa de Lauretis, Lauren Berlant, Leo Bersani, Lee Edelman, Jack Halberstam, David Halperin, Jose Esteban Munoz, Eve Kosofsky Sedgwick, dan lain-lain.

“Bahwa lesbian bukan perempuan” dilontarkan oleh Monique Wittig di tahun 1980 dalam “La Pensée straight” sebagai bagian dari mengurangi kecemasan modernitas dalam menghadapi esensialisme metafisika kehadiran (muasal politik identitas Foucault). Jika Beauvoir menyatakan bahwa seseorang tak terlahir sebagai perempuan, tetapi ‘menjadi’ perempuan; maka Wittig memberikan penekanan pada kata ‘perempuan’: bahwa seseorang

tak terlahir sebagai ‘perempuan’ secara alamiah. Kedua kalimat tersebut sama, tetapi karena penekanan yang berbeda, kemudian menghasilkan makna yang tidak sama dalam diskursus sosial, politik, ekonomi dan terlebih dalam politik linguistik dan politik identitas. Lesbian adalah konsep yang melampaui kategori, bagi Wittig, karena lesbian melampaui identitas laki-laki atau perempuan dalam statusnya atas reproduksi, atas perbudakan dalam keluarga. Sehingga, lesbian bukan perempuan, secara ekonomi, secara politik, secara ideologis. Lesbian sebagai identitas meretaskan dirinya dari identitas yang janggal dari menjadi perempuan, baru kemudian sampai pada lesbian. Atau bahwa lesbian melakukan perjalanan bolak-balik, dari menjadi perempuan, dari menjadi laki-laki, atau sebut saja dengan mudah dari menjadi ‘lesbian’ saja. Ia mengalami dan memikirkan subjektivitas kognitifnya atas ruang konseptual yang amat berisiko dan berbahaya karena ia berada dalam lubang-hitam yang tak diakui dalam diskursus manusia atas ‘dunia’. Sedang bahasa sebagai jalan mediasi, jalan representasi, merupakan ‘alat pembunuh’ pertama atas apa-apa yang berada di luar kategori sebagai ‘berbahaya’.

Diskursus ini dibangun dari pergulatan feminisme dalam melawan ide bahwa gender merupakan entitas esensialis-diri yang dibentuk dan dikonstruksi secara sosial-budaya, yang kemudian melahirkan identitas seksual yang dianggap “alamiah” padahal bukan. Teori ini mendenaturalisasi apa-apa yang normatif dan apa-apa yang disebut sebagai ‘melenceng’ dari kodrat alam. Queer berfokus pada sirkulasi jenis kelamin, gender dan hasrat. Tak hanya itu, ia juga membahas perihal *cross-dressing* (cara berpakaian berbeda dari ‘kodrat’ gender), interseksualitas, ambiguitas gender dan operasi kelamin. Teori ini kurang begitu berkembang dalam kajian-kajian di Indonesia, meskipun telah ada, tetapi tidak sebanyak dalam Kajian Wanita. JP Edisi 87 ini diterbitkan untuk publik luas dengan menarasikan beberapa sejarah gerakan LGBTIQ di Indonesia, disamping juga melakukan penelitian-penelitian paling kontemporer oleh dari atas untuk LGBTIQ. (Pemimpin Redaksi, **Dewi Candraningrum**)

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015

Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

BJD. Gayatri. Aktivis untuk Social Justice, Pendiri Koalisi Perempuan Indonesia, . Pendiri Suara Ibu Peduli, Mantan Penasihat Internasional Asia-Pasifik IGLHRC 1993-1997

Selarung Gerakan Lesbian dalam Epidemi Kebencian: Awal Advokasi SOGIE (Sexual Orientation, Gender Identity and Expression) di Nusantara

Plurality of Lesbian Movements under Hatred-Epidemic: Initiation of SOGIE Advocacy in Nusantara

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 269-288, 1 gambar, 37 daftar pustaka.

This paper is an overview toward SOGIE (Sexual Orientation, Gender Identity and Expression). This charted the history of lesbianism in Indonesia. Approach being used is feminist personal history. There are two approaches in advocacy of human-right based SOGIE. First, the advocacy toward KUHP (product of law) that is based on positive and gender-normative that will endangered the existence of LGBT in Indonesia. Second, SOGIE-activists shall understand fully the plurality of gender and sexuality that is home-grown in Indonesia. This is the best way to advocate the rights as an integral part of Nusantara culture.

Keywords: SOGIE, LGBTIQ, feminist personal history, advocacy.

Makalah ini merupakan pengantar tentang keberagaman gender dalam SOGIE-HAM. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah personal feminis (*feminist personal history*). Paper ini akan mengulas sejarah lahirnya gerakan lesbian di Indonesia. Terdapat dua hal untuk advokasi SOGIE ini. *Pertama* untuk perubahan dan perbaikan Undang-undang sedang terus terjadi di negeri Nusantara yang bhineka ini, misalnya melalui rancangan perubahan KUHP yang saat ini sedang berlangsung, yang akan mengkriminalisasi LGBTIQ, entah karena alasan panik moral atau apa. Dalam kerangka ini para akademisi atau ilmuwan profesi dan kelompok agama yang homofobik juga perlu dicermati. *Kedua*, negeri ini memiliki kekayaan "Keberagaman Gender dan Seksualitas" namun aktivis LGBTIQ, termasuk aktivis perempuan hampir tidak ada yang menggali kekayaan ini, sehingga kita tidak mengenali dan kemudian menjadi terasing dari akar-budaya sendiri.

Kata kunci: SOGIE (Orientasi Seksual, Identitas dan Ekspresi Gender), LGBTIQ, sejarah personal feminis, advokasi.

Sri Agustine, Evi Lina Sutrisno & Dewi Candraningrum.
Ardhanary Institute & Jurnal Perempuan.
ardhanaryinstitute.org

Diri, Tubuh dan Relasi: Kajian atas Transgender FTM (Female to Male) di Jakarta.

Self, Body, and Relation: a Study of FTM Transgender in Jakarta

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 289-302, 20 daftar pustaka.

The existence of *Male to Female* (MTF) or in Indonesian word known as Waria is more popular than Female to Male (FTM). Existence of FTM or someone biologically born as woman but identified herself as man is not well-researched and well-documented. That is why this group is difficult to be identified in the public discourse. Jakarta was chosen in this research as this city represented FTM from other areas around

Indonesia. This study found that someone that biologically woman is not otomatically identified herself as woman. The process of self-definition is fluid. In the process of finding the self, FTM faced violences from states, society, work-place, and family.

Keywords: Self, FTM (Female to Male), Sex, Gender, Jakarta.

Eksistensi transgender *Male to Female* (MTF) atau yang secara umum sering kita dengar dengan istilah *Waria* lebih populer dibandingkan dengan transgender *Female to Male* (FTM). Eksistensi FTM atau seseorang yang terlahir secara biologis perempuan tetapi mendefinisikan dirinya sebagai laki-laki belum diangkat dan terdokumentasikan secara baik, sehingga eksistensi FTM sulit dikenali dalam diskursus publik. Pemilihan Jakarta sebagai area penelitian karena merupakan kota urban yang merepresentasikan Indonesia. Responden yang diinterview berjumlah 22 orang, dan di dalam perjalanan penelitian, 5 FTM dari luar Jakarta. Studi FTM ini menemukan bahwa seseorang tidak secara otomatis akan mendefinisikan gendernya sesuai dengan seks/jenis kelamin biologisnya. Mereka membentuk identitas dirinya sendiri secara subjektif melalui proses pendefinisian diri. Dalam perjalanan menuju "diri", FTM mengalami banyak kekerasan baik dari Negara, masyarakat, tempat kerja dan keluarga.

Kata Kunci: Diri, FTM (Female To Male), Seks, Gender, Jakarta.

Hartoyo. Pendiri dan Ketua Suara Kita & Mahasiswa Pascasarjana Sosiologi Universitas Indonesia
www.suarakita.org

"Mengapa Saya Mendirikan Suara Kita?" Sebuah Memoar "Why I founded Our Voice": a Memoir

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 303-308, 8 daftar pustaka.

Reformation Era has brought equality to any social movement such as LGBT circle. This era asked and gave opportunity to engage actively in the governance in many ways. Those that entered formal politics, or outside of formal politics such as NGO and community service. LGBT issue is becoming new term in the activism in Indonesia and that is why I established Suara Kita (Our Voice) to celebrate our identity and social justice. This paper narrated the establishment of this organization up to the present time under repression of the society.

Keywords: LGBT, Our Voice, reformation era, social justice.

Harus diakui reformasi membawa angin segar bagi setiap gerakan sosial dalam isu apapun, termasuk kelompok LGBT. Di era reformasi, publik dipaksa untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan dengan beragam cara. Ada yang masuk ke politik formal, tetapi ada yang memilih di luar jalur atau sistem politik. Semua peluang itu terbuka di era reformasi. Tetapi harus diakui, pada isu LGBT karena gerakan identitas masih relatif baru dalam gerakan sosial, maka peluang reformasi baru bisa ditangkap atau direspons untuk mengangkat isu LGBT dalam wacana publik. Tulisan ini menjelaskan perjalanan Suara Kita sejak berdiri sampai dengan sekarang sebagai organisasi LGBT yang konsisten menyuarakan keadilan sosial.

Kata kunci: LGBT, Suara Kita, era reformasi, keadilan sosial.

Ayu Regina Yolandasari. Women's Studies, Ewha Womans University, Korea Selatan & Ardhany Institute. 52 Ewhayeodae-gil, Seodaemun-gu, Seoul, South Korea. Phone:+82 2-3277-2114

Penyebab atau Penyembuh? Kekerasan Seksual terhadap Lesbian, Biseksual, dan Transgender Female-to-Male di Indonesia

Causes or Cures? Sexual Violence against Lesbian, Bisexual and Transgender Female-to-Male in Indonesia

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 309-314, 13 daftar pustaka.

Sexual violence is a crime in which the victims are usually blamed for being the cause. When it happened to a cisgender heterosexual woman, many people tend to use her appearance and her behavior to justify the victim blaming. It would even be more complicated for lesbian, bisexual women, or female-to-male transgender (LBT). When sexual violence happened to them, their sexual and/or gender identity tend to be added on the reasons to justify the perpetrators' actions. Strangely, in contrast to that, this crime is also usually thought as the cause of their being LBT. This paper is aimed to explore this paradoxical thoughts of sexual violence against LBT, its effects on LBT's lives, and efforts made to break through the paradox itself.

Keywords: LBT (Lesbian, Bisexual, Transgender), sexual violence, Indonesia.

Kekerasan seksual adalah sebuah kejahatan dimana korban sering kali menjadi pihak yang disalahkan karena dianggap sebagai penyebab terjadinya kejahatan tersebut. Ketika kejahatan ini terjadi pada perempuan cisgender heteroseksual, banyak orang yang cenderung menjadikan penampilan dan tingkah laku korban sebagai justifikasi untuk menyalahkannya. Saat kejahatan yang sama terjadi pada lesbian, perempuan biseksual, dan transgender *female-to-male* (LBT), situasinya pun menjadi lebih kompleks, di mana identitas seksual dan/atau identitas gender mereka cenderung dijadikan alasan tambahan untuk menjustifikasi tindakan pelaku terhadap mereka. Anehnya, berlawanan dengan hal tersebut, kejahatan ini juga sering kali dianggap sebagai penyebab seseorang menjadi LBT. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi paradoks terkait kekerasan seksual terhadap LBT, dampaknya pada kehidupan LBT, dan upaya yang dilakukan untuk membongkar paradoks itu sendiri.

Kata kunci: LBT (Lesbian, Bisexual, Transgender), kekerasan seksual, Indonesia.

Sari Andajani, Dinar Lubis & Sharyn Graham-Davies. Faculty of Health and Environmental Sciences & Faculty of Culture and Society Auckland University of Technology . 55 Wellesley Street East, Auckland Central

Razia terhadap LGBT sebagai Agenda Moralitas Palsu: Kajian Pemberitaan Media di Indonesia

Raids against LGBT as Fake Moral Agenda: a Study on News Media in Indonesia

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 315-320, 31 daftar pustaka.

As a signatory to the Beijing Convention, Indonesia has the responsibility to live up to certain expectations, one of these is to safe guard human rights and the right to freedom of sexuality and access to sexual health. In this article we show this is not the case. In particular, because police are allowed to conduct raids on hotels and people are too scared to be open about their sexuality. As a result of being scared, people are not

able to access sexual health care. Police raids are imposing a sexual morality agenda and the media is exploiting such raids by using horrific pictures, denigrating language maintaining stigmatization. If Indonesia is to get serious about HIV prevention, discrimination against GBV, police raids and violence against LGBT must stop.

Keywords: raids, sexual minorities, LGBT, HIV/AIDS.

Sebagai negara yang menandatangani Konvensi Beijing, Indonesia memiliki mandat dan tanggung jawab untuk mempromosikan, melindungi dan memenuhi hak warga negaranya akan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi, tanpa diskriminasi. Artikel ini menunjukkan bahwa, situasi penegakan hak-hak asasi manusia akan kesehatan seksual dan reproduksi adalah sangatlah jauh dari harapan. Tulisan ini mengangkat wacana akan peran polisi dan masyarakat awam, kelompok *vigilante*, dalam melakukan razia di hotel-hotel dan tempat-tempat yang dinyatakan rentan akan perilaku seksual menyimpang. Yang kesemuanya itu memupuk rasa takut dan mereka kelompok ragam identitas gender dan seksualitas tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan. Razia polisi yang diwacanakan sebagai agenda penegakan moralitas masyarakat dan eksploitasi media massa dengan gambar yang seram, tidak santun, bahasa yang melecehkan justru makin melestarikan stigma sosial terhadap kelompok LGBT. Apabila Indonesia mempunyai niat serius dengan upaya penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS, semua pelecehan terhadap kelompok-kelompok LGBT dan minoritas seksual lainnya haruslah dihentikan.

Kata kunci: razia, minoritas seksual, LGBT, HIV/AIDS.

Tanti Noor Said. Universiteit van Amsterdam. 1012 WX Amsterdam, Netherlands. Phone:+31 20 525 9111

Politik Gender dan Seksualitas: Transgender Indonesia dalam Konteks Masyarakat Indonesia dan Eropa Barat

Gender Politics and Sexuality: Indonesian Transgender in the Context of Indonesia and Western Europe Society

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 321-327, 15 daftar pustaka.

This paper attempts to analyze how Indonesian gay males and transgenders male to female in two different social, cultural and political contexts (in Indonesia and Northern Europe) are actively engaged in the making of their own subjectivity. Their subjectivities are entangled with gender, sexuality, religion, romantic love relationships and kinship. They juggle in negotiating and making sense of norms and values of societies that projected towards them. This paper aims to shed light on gender politics of gay and transgender Indonesians in the context of heterosexual hegemony and migration.

Keywords: transnational migration, LGBT activism, gay, transgender.

Tulisan ini menganalisis bagaimana gay dan transgender dalam dua dunia yang berbeda, secara sosial, budaya dan politik, yaitu Indonesia dan Eropa Barat, aktif berpartisipasi dalam pembentukan subjektivitasnya. Subjektivitas gender dalam kajian ini terkait dan tak dapat dipisahkan dari seksualitas, agama, hubungan romantis mereka dengan laki-laki dari Eropa Barat dan tali ikatan persaudaraan mereka dengan keluarga mereka di Indonesia. Mereka berjuang menegosiasikan norma dan nilai masyarakat yang yang diproyeksikan oleh masyarakat terhadap mereka. Kajian ini menyimpulkan bahwa subjektivitas gender dan seksual seseorang yang minoritas ditentukan oleh struktur yang dominan di dalam masyarakat.

Kata kunci: migrasi, transnasional, subjektivitas, aktivisme LGBT, gay, transgender.

Hendri Yulius Wijaya. Lee Kuan Yew School of Public Policy,
National University of Singapore. 469C Bukit Timah Rd,
Singapore 259772. Phone:+65 6601 2875

Memetakan Tubuh, Gender, dan Seksualitas dalam Kajian Queer

Mapping Body, Gender, and Sexuality in Queer Studies

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 329-338, 1 gambar, 1 tabel, 24 daftar pustaka.

This paper examines the complexities of human sexuality by challenging assumptions that have been built on binarism and biological-determinism. This attempt is done by examining the development of sexuality theory and studies from feminism to queer theory, through the lens of some theorists, from Michel Foucault, Judith Butler, Jack Halberstam, to Sara Ahmed. In addition, the development of sexuality studies in Indonesia is also explored, in order to show a myriad of interactions and relations of knowledge between global and local. Queer theory also provides space to criticize the hegemony of existing 'labels' which are originated from the West, and also to show that the meaning and subjectivity shaped by these labels are not always fixed when they are transferred to Indonesian context. For above reasons, this paper introduces the theoretical concept of sex(t)uality—in which sexuality operates like text.

Keywords: Sex, text, queer, global, local, feminism, sex(t)uality.

Makalah ini menganalisis kompleksitas seksualitas manusia dengan menantang asumsi-asumsi yang dibangun atas pemikiran biner yang biasanya memiliki kecenderungan deterministik biologi. Upaya ini dilakukan dengan memaparkan perkembangan teori seksualitas mutakhir, mulai dari feminisme hingga kajian queer, melalui teori-teori Michel Foucault, Judith Butler, Jack Halberstam, hingga Sara Ahmed. Selain itu, perkembangan kajian seksualitas di ranah lokal juga turut dipaparkan untuk melihat bagaimana interaksi dan relasi pengetahuan antara tingkat global dan lokal. Pendekatan teori queer juga memberikan ruang untuk melakukan kritik terhadap hegemoni label seksualitas yang dibawa dari Barat dan menunjukkan bahwa label-label tersebut tidak selalu memiliki makna yang sama dengan asalnya. Inilah alasan mengapa konsep sex(t)uality/ seks(t)ualitas diperkenalkan di sini, bahwa seksualitas beroperasi seperti layaknya teks.

Kata Kunci: Seks, teks, queer, global, lokal, feminisme, sex(t)uality.

Yulianti Muthmainnah. Program Studi Diplomasi, Pascasarjana
Universitas Paramadina. The Energy Tower 22nd Floor, SCBD
Lot. 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190

Hak Asasi Manusia LGBT dalam Kebijakan Dalam Negeri Indonesia1

LGBT's Human Rights in the Indonesian Interior Policies

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 339-355, 1 tabel, 37 daftar pustaka.

Human rights which were convened by international laws and United Nations is at present universally ideal. However in implementation, this universality was constrained by interior politics, sovereignty, religious interpretation, and culture. Issues of LGBT has received wave of protests internationally and nationally though their rights are guaranteed within laws. Include LGBT issue has been debated on the national and local level. On the other hand, state has responsibility to promote, to protect, and to fulfill human rights for every single person, even people with sexual orientation and gender identity from any harms and violences. This paper will explore how human rights in Indonesia interior politics will protect LGBT groups.

Keywords: human rights, LGBT, interior politics.

Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah disepakati hukum internasional dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) secara ideal harus bersifat universal. Akan tetapi, dalam implementasinya, atas nama kepentingan dalam negeri, kedaulatan negara, agama, ataupun budaya, keuniversalitasan HAM ini dibatasi oleh negara atau pihak-pihak tertentu, sehingga HAM menjadi relatif dalam pelaksanaannya. Termasuk pada isu LGBT yang masih menuai perdebatan baik di tingkat lokal maupun nasional. Padahal pengakuan, perlindungan dan pemenuhan HAM LGBT menjadi tanggung jawab negara. Tulisan ini akan mengurai bagaimana hak asasi manusia LGBT dilaksanakan dalam kebijakan dalam negeri Indonesia.

Kata kunci: hak asasi manusia, LGBT, politik dalam negeri.

Masthuriyah Sa'dan. Solidaritas Perempuan Kinasih & UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281. Telp:(0274) 589621

LGBT, Agama dan HAM: Kajian Pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl

LGBT, Religion, and Human Rights: a Study on Khaled M. Abou El-Fadl's Thoughts

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 357-366, 16 daftar pustaka.

The Fatwa "Haram" of MUI against homosexual orientation (LGBT) and the death penalty against LGBT had shaken the Indonesian, and further marginalized "third" gender people. "Religion" is urged to provide justice to the Ummah but the Ulama did the opposite thing by discriminating sexual minorities. The legal instrument of regional, national and international human rights has recognizes LGBT rights as basic human rights. Islamic religion in this case Shari'ah and Islamic law is used as a theological foundation by MUI to issued the fatwa that is contrary to the concept of human rights. The progressive interpretation of Khaled M. Abou El-Fadl became important to be studied to protect LGBT. Khaled attempted to break up the tension between religion (Islam) and human rights by using the social approach of contemporary humanities. By this means, Abou El-Fadl introduced a scheme of protection to LGBT under Quranic Syariah Law.

Keywords: LGBT, religion, human rights, Khaled M. Abou El-Fadl.

Fatwa "haram" MUI terhadap kelompok homoseksual (LGBT) dan hukuman mati terhadap pelaku seksual "menyimpang" membuat rakyat Indonesia terganggu, khususnya mereka yang merasa memiliki identitas gender "ketiga". "Agama" yang seharusnya memberikan jalan kemudahan, seolah-olah mengubur hidup-hidup seseorang yang memiliki orientasi seksual homo. Padahal, instrumen hukum regional, nasional dan internasional tentang HAM mengakui hak-hak mereka sebagai manusia. Agama Islam dalam hal ini syari'ah dan hukum Islam yang dijadikan landasan teologis fatwa MUI bertolak belakang dengan konsep HAM. Dengan demikian, pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl menjadi penting untuk dikaji. Khaled berupaya meleraikan ketegangan antara agama (Islam) dan HAM dengan menggunakan pendekatan *social humanity contemporary*.

Kata kunci: LGBT, Agama, HAM, Khaled M. Abou El-Fadl.

Gadis Arivia dan Abby Gina. Departemen Filsafat, FIB,
Universitas Indonesia. Kampus UI Depok Jawa Barat
16424, Indonesia. Telepon, : +62.21.7270009. Faksimile, :
+62.21.7270038

**“Makna Hidup” Bagi LGBT Ketika Negara Abai: Kajian
Queer di Jakarta**

**“Meaning of Life” for LGBT when State Ignores: a Queer
Study in Jakarta**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 367-376, 1 gambar,
9 tabel, 16 daftar pustaka.

This study provides an overview of problems faced by LGBT in Indonesia. There are four issues raised i.e. the meaning of gender and sexual orientation, violence and abuse, the role of the state, and the meaning of happiness. This study uses a sample of 60 respondents living in big cities, especially in Jakarta. However, the strength of this study lies not in the result of the survey, but the result of the in-depth interviews.

From this study it was found that in the context of a conservative state, the respondents are more open through interviews. This study unearths LGBT's meaning of life under the repressive and absence role of the state.

Keywords: LGBT, meaning of life, violence, state.

Penelitian ini memberikan gambaran tentang persoalan yang dihadapi LGBT di Indonesia. Ada empat isu yang mengemuka yaitu soal makna gender dan orientasi seksual, kekerasan dan pelecehan, peran negara, dan makna hidup bahagia bagi LGBT. Penelitian ini menggunakan 60 sample responden yang hidup di kota besar terutama di Jakarta. Namun, kekuatan dari penelitian ini tidak terletak pada hasil survei melainkan pada hasil wawancara mendalam. Dari penelitian ini ditemukan bahwa para responden, dalam konteks negara konservatif, lebih bisa terbuka lewat wawancara dan bukan lewat pengisian kuesioner. Kajian ini mengungkap makna hidup bagi LGBT di bawah Negara yang represif dan abai pada kelompok minoritas.

Kata Kunci: LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender), makna hidup, kekerasan, negara.

Selarung Gerakan Lesbian dalam Epidemi Kebencian: Awal Advokasi SOGIE (*Sexual Orientation, Gender Identity and Expression*) di Nusantara

Plurality of Lesbian Movements under Hatred-Epidemic: Initiation of SOGIE Advocacy in Nusantara

BJD. Gayatri

Aktivis untuk *Social Justice*, Pendiri Koalisi Perempuan Indonesia,
Pendiri Suara Ibu Peduli, Mantan Penasihat Internasional Asia-Pasifik IGLHRC 1993-1997

bgayatri07@yahoo.co.uk

Naskah Diterima 1 Mei 2015. Direvisi 24 Juni 2015. Disetujui: 10 Juli 2015

Abstract

This paper is an overview toward SOGIE (Sexual Orientation, Gender Identity and Expression). This charted the history of lesbianism in Indonesia. Approach being used is feminist personal history. There are two approaches in advocacy of human-right based SOGIE. First, the advocacy toward KUHP (product of law) that is based on positive and gender-normative that will endanger the existence of LGBT in Indonesia. Second, SOGIE-activists shall understand fully the plurality of gender and sexuality that is home-grown in Indonesia. This is the best way to advocate the rights as an integral part of Nusantara culture.

Keywords: SOGIE, LGBTIQ, feminist personal history, advocacy.

Abstrak

Makalah ini merupakan pengantar tentang keberagaman gender dalam SOGIE-HAM. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah personal feminis (*feminist personal history*). Paper ini akan mengulas sejarah lahirnya gerakan lesbian di Indonesia. Terdapat dua hal untuk advokasi SOGIE ini. *Pertama* untuk perubahan dan perbaikan Undang-undang sedang terus terjadi di negeri Nusantara yang bhineka ini, misalnya melalui rancangan perubahan KUHP yang saat ini sedang berlangsung, yang akan mengkriminalisasi LGBTIQ, entah karena alasan panik moral atau apa. Dalam kerangka ini para akademisi atau ilmuwan profesi dan kelompok agama yang homofobik juga perlu dicermati. *Kedua*, negeri ini memiliki kekayaan "Keberagaman Gender dan Seksualitas" namun aktivis LGBTIQ, termasuk aktivis perempuan hampir tidak ada yang menggali kekayaan ini, sehingga kita tidak mengenali dan kemudian menjadi terasing dari akar-budaya sendiri.

Kata kunci: SOGIE (Orientasi Seksual, Identitas dan Ekspresi Gender), LGBTIQ, sejarah personal feminis, advokasi.

Pendahuluan

Pewacanaan "Keberagaman Gender dan Seksualitas", merupakan topik luas, kompleks (*complex*) dan rumit (*complicated*). Membentang dari hal yang paling konkret/nyata --kelamin adalah yang dapat langsung dilihat seperti warna kulit atau ras--, hingga yang paling abstrak yang biasanya dikunyah-kunyah para filosof yang tak terlalu peduli jika khalayak awam tak juga paham. Dibedah dengan pisau esensialisme, konstruksionisme [sosial], psikoanalisis, feminisme hingga dekonstruksionisme. Lengkap semua melekat dan inheren ke dalam topik yang satu ini. Bukankah teori-teori gender dan seksualitas yang serba canggih itu sedemikian mengabstrak, padahal seringkali tidak disertai dengan data-data yang adekuat untuk teori-teori

tersebut (Vance, 1992, hal. 444), baik di Indonesia maupun secara global. Makalah ini merupakan pengantar dan upaya berbagi pengetahuan dan wacana yang selama ini sulit diakses¹ pembaca juga aktivis untuk SOGIE-HAM² di Indonesia yang keduanya perlu dibekali dengan kerangka dan wacana ideologi feminisme. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah personal feminis (*feminist personal history*)³.

Pada awalnya, Seksualitas diidentifikasi oleh disiplin ilmu medis-biologis melalui alat kelamin sebagai tanda lahiriah. Seks diterjemahkan dari Bahasa Inggris "*sex*", yang dalam Bahasa Indonesia menjadi: "jenis kelamin"⁴, karena melihat dari alat kelaminnya. Dari hal yang biologis ini kemudian juga

diidentifikasi individu yang terlahir dengan alat kelamin ganda, yang dikemudian hari disebut "interseks". Inilah ihwal-pangkal permasalahan untuk seks (baca: jenis kelamin), karena para ahli di bidang medis ini kemudian hendak menentukan baik kelamin maupun orientasi seksual sang individu yang interseks tersebut. Adapun orientasi seksual yang kemudian diistilahkan sebagai seksualitas, sesungguhnya diawali dari kajian bidang seksologi dan bidang psikiatri dalam ilmu medis (kedokteran), termasuk juga istilah gender⁵.

Istilah (terminologi) gender digunakan pertama kali pada kajian (studi) John Money, seorang dokter (medis) spesialis seksologi, pada tahun 1955, sebagai berikut:

Gender merupakan susunan karakteristik mengenai dan yang membedakan antara maskulinitas dan feminitas. Tergantung pada konteks, karakteristik tersebut dapat saja termasuk jenis kelamin (biologis, seperti misalnya laki-laki/jantan, perempuan, betina atau interseks), struktur sosial yang berdasarkan jenis kelamin (termasuk aturan gender/'gender roles' dan aturan sosial lainnya), atau identitas gender. (Lihat: <https://en.wikipedia.org/wiki/Gender>)

Dr. Money memperkenalkan istilah ini untuk membedakan antara seks (jenis kelamin) yang biologis dengan gender sebagai peran [dalam peran gender]. Dimana sebelum dr. Money memperkenalkan temuan dalam bidangnya di tahun 1955 tersebut, istilah ini belum dikenal maupun dipergunakan secara umum⁶. Kemudian, baru sesudah tahun 1970 ketika teori feminis mulai mencakup --dalam teori-teorinya-- konsep yang membedakan antara seks (jenis kelamin) yang biologis dengan [konsep] maskulin-feminin yang merupakan konstruksi sosial yang disebut gender. Khususnya ketika beberapa feminis mengkritisi, mempertanyakan sambil mengonsep tentang gender yang berkaitan dengan peran-peran gender yang berkaitan dengan konstruksi sosial⁷. Lalu, WHO (World Health Organization) menggunakan dalam edaran internasionalnya secara meluas, sejak tahun 1973-an (*ibid*). Sejak saat itu, istilah "Gender" mendapatkan definisi, pengertian, maupun determinasi yang semakin dipertajam, diperluas-atau-dipersempit.

Jadi, disiplin kedokteran mencoba menganalisis "Gender dan Seksualitas" berdasarkan hal yang berkaitan bukti kelamin biologis yang konkret/

nyata/kasat-mata. Disiplin ini, melalui bidang psikiatrianya kemudian menetapkan batas "normal" dan "tidak-normal" untuk seksualitas diluar heteroseksualitas, seraya menetapkan dan dikaitkan dengan gangguan kejiwaan atau penyimpangan seksual. Hal tersebut tertuang dalam aturan asosiasi profesional yang disebut DSM, kependekan dari: "*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*"⁸. DSM ini merupakan sebuah acuan resmi untuk klasifikasi yang komprehensif dan resmi, apa-apa saja yang dinyatakan sebagai gangguan-gangguan psikiatri atau gangguan kejiwaan, yang diterbitkan oleh ApA (*American Psychiatric Association*)⁹, yang digunakan bagi profesional di bidang kesehatan mental, yang kemudian diadopsi oleh APA (*American Psychologist Association*), yang kemudian diadopsi oleh ikatan profesi sejenis di seluruh dunia¹⁰, termasuk di Indonesia dengan PPDGJ-nya. Penetapan tersebut, beserta pemahaman bahwa seksualitas diluar heteroseksual adalah penyimpangan, merupakan sebuah pemaksaan dan kejahatan asasi manusia. Hal ini merupakan dosa besar bidang medis (psikiatri) dan psikologi-klinis untuk peradaban manusia secara global.

Epidemi Kebencian

Penulis mengemukakan fakta medis-klinis ini, justru karena alasan ini di berbagai negara dan belahan dunia, selalu digunakan untuk memasukkan dalam ranah hukum-sipil dengan menggunakan alasan medis-klinis tersebut, termasuk yang perlu diwaspadai untuk Indonesia yang sedang berlangsung draf-akademis untuk perbaikan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana¹¹). Hal ini merupakan salah satu dari musuh besar bagi advokasi SOGIE-HAM, terhadap "Keberagaman Gender dan Seksualitas" yang dimiliki negeri nusantara, yang berbhineka ini. Debat disiplin medis di atas selalu dianggap sebagai debatnya para esensialis. Alasan medis memang seringkali digunakan untuk mengontrol perilaku, dalam hal ini perilaku seksual seperti yang dinyatakan Foucault¹², dengan menakut-nakuti melalui kategorial gangguan kejiwaan atau penyimpangan. Bukankah hal yang sama juga digunakan oleh pemerintah dan militer negeri ini, bagi para oposan pemerintah dengan melabel sebagai PKI/komunis? Hal yang sama juga digunakan oleh "Kelompok-Kanan" di Amerika Serikat kepada para feminis (Vance 1992). Itu sebabnya, penetapan klinis ini adalah politik, vis-a-vis dengan pernyataan Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, bahwa penetapan

pengeluaran gangguan kejiwaan bagi nonheteroseksual, karena para dokter psikiatri atau psikolog banyak yang gay. Bagi penulis, sikap-sikap seperti: homofobia atau fobia-gay; kebencian terhadap nonhetero; bahkan pada penyebaran-penyebaran kebencian tersebut --semacam epidemi kebencian--, memang bisa dimiliki dan ditunjukkan oleh siapapun, tidak terkecuali seorang profesor-dokter sekalipun. Dalam dunia psikiatri dan psikologi-klinis, dikenal bahwa fobia adalah gangguan kejiwaan¹³. Jadi, siapa yang sesungguhnya terganggu kejiwaannya? Seseorang yang penuh dengan kebenciankah atau yang lainnya?

Sementara baik Foucault, Vance maupun banyak feminis lainnya, mengajak untuk melihat melalui pendekatan yang berbeda dan sama-sama menyatakan bahwa Seksualitas (dan Gender) adalah hasil dari konstruksi sosial¹⁴. Salah satu konsep dan definisi yang ditawarkan oleh Carole Vance, seorang feminis dari Amerika Serikat, adalah sebagai berikut:

Seksualitas memiliki tantangan untuk dunia intelektual feminis, karena merupakan persimpangan dari hal-hal yang bersifat politikal, sosial, ekonomis, sejarah, personal (pribadi) dan pengalaman, menghubungkan perilaku dan pikiran, fantasi dan tindakan. Secara individu, hal tersebut merupakan persimpangan masa lalu, masa kini, dan pengalaman masa mendatang di dalam kehidupannya¹⁵. Bahwa batasan (*domain*) ini saling berpotongan tidak berarti hal tersebut adalah identikal, karena bahaya pengembangan politik-seksual feminis yang berdasarkan pengalaman pribadi itu sendiri dapat tergambarkan. Kita perlu metodologi yang canggih dan analisis yang memungkinkan penerimaan setiap batasan tertentu termasuk keragaman persimpangan. Terlepas banyaknya saling-hubungan dari seksualitas dan gender kita tidak percaya bahwa seksualitas adalah sub-bagian dari jenis kelamin, kategori pembuangan (sisa), bukan juga karena teori gender sepenuhnya adekuat, pada saat ini, untuk mempertimbangkan seksualitas¹⁶. (Vance 1992, hal. 444)

Dengan pendekatan konstruksionisme saja sudah mensyaratkan pemahaman yang berdasarkan pada logika abstrak karena konstruksi sosial adalah hal yang tidak dapat dilihat secara kasat mata melalui indra manusia, ditambah feminisme sendiri juga bukan merupakan kajian yang mudah dipahami.

Apalagi jika sebelum mengetahui atau mempelajari [feminisme] sudah diiringi dengan kecurigaan atau kebencian baik terhadap ilmunya sendiri maupun terhadap para feminisnya. Pasti akan mengalami hambatan untuk mengerti dan paham. Itu sebabnya, konsep “Gender dan Seksualitas” tidak dengan serta merta dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat yang selama ini sudah terdiktomi dalam konsep stereotip yang biner maskulin-feminin, dilekatkan secara stereotip laki(jantan)-maskulin, perempuan(betina)-feminin, dalam masyarakat yang kental menganut nilai-nilai heteronormativ yang sudah terbiasa menghakimi, menghojat dan menyebarkan epidemi kebencian (*hatred*) dan ketakutan (*paranoia*) terhadap nonhetero. Jadi, siapa yang sesungguhnya mengalami gangguan kejiwaan?

Ini bukan hanya sialnya (*unfortunately*) lagi, namun celaka betul jika fenomena [keberagaman] gender dan seksualitas semata-mata dilihat dari sebuah kaca mata, sebuah perspektif --dalam hal ini-- medis (kedokteran), apalagi dengan menggunakan sebuah parameter dari pandangan baik psikiatri maupun psikologi-klinis. Keterbatasan logika medis yang eksakta alias logika konkret ini berbahaya bagi prasyarat memahami “Keberagaman Gender dan Seksualitas” yang multi-faset dan multi-disiplin yang mensyaratkan pula logika abstrak alias logika yang dimiliki oleh ilmu-ilmu sosial dan bahasa¹⁷. Adalah disiplin psikologi, sub-bidang psikologi perkembangan, yang mengkaji perkembangan kognitif (*cognitive development*), bahwa perkembangan logika akan lebih mudah jika diawali pada tahapan konkret menuju ke tahapan abstrak¹⁸. Jika dalam perkembangannya kemudian ilmu-ilmu sosial (*social sciences*) memiliki cabang kajian gender, hal tersebut adalah kebutuhan untuk mencari jawab, apakah perbedaan biologis (jenis kelamin) pada betina (perempuan) dengan jantan (laki-laki) memengaruhi pembentukan identitas gender.

Sayangnya, “gender” yang merupakan terminologi, kemudian direduksi menjadi sekadar kata, yang membingungkan untuk konteks sebuah masyarakat yang selama ini sudah terdiktomi dalam konsep yang biner maskulin-feminin, dalam nilai-nilai yang heteronormatif. Khususnya ketika dilekatkan secara stereotip pada jenis kelamin laki-maskulin, perempuan-feminin. Semakin sering istilah yang satu ini diwacanakan dan didiskusikan, bahkan digunakan untuk implementasi program-program pembangunan [sosial], bukan semakin menjadi jelas, malahan seakan semakin ruwet dan membingungkan,

khususnya bagi kelompok yang mendasarkan pada nalar/logika konkret itu tadi¹⁹. Misalnya, penggunaan kata “gender” dalam program [bantuan] pembangunan dalam tajuk “Gender and Development” (GAD) atau “Gender in Development”²⁰ (GID), terutama setelah Konferensi Dunia tentang Perempuan tahun 1985 di Nairobi. Awalnya program bantuan pembangunan tersebut bertajuk “Women and Development” (WID) atau “Women in Development” (WAD). Sehingga jangan salahkan jika, misalnya, para birokrat di berbagai daerah di Indonesia --yang terdampak program ini-- memahaminya bahwa kata “perempuan” sudah diganti dengan kata “gender”. Untuk menambah daftar kerancuan pengertian “gender” itu ketika program global “Pengaruh-utamaan Gender” (*Gender Mainstreaming*) masuk Indonesia²¹, lengkap bukan?

Dengan begitu, menambah deretan salah kaprah mendasar untuk memahami konsep gender sebatas menyamakan konsep gender dengan pembagian jenis kelamin biologis --sebatas konsep yang biner--, atau sebatas kata pengganti untuk “perempuan”. Padahal, “Gender” adalah istilah yang dalam tataran kognitif-linguistik (kebahasaan) merupakan konsep yang abstrak dibandingkan dengan istilah seks (baca: jenis kelamin) yang merupakan kata yang menunjuk pada sesuatu yang konkret, karena bukankah alat kelamin itu memang dapat dilihat secara konkret.

menjadi pengganti kata jenis-kelamin (atau seks):

Belum lagi jika “Keberagaman Gender dan Seksualitas” ini diimbui dengan asumsi serampangan, bahwa ini akibat pengaruh nilai-nilai dari budaya tertentu, budaya “Barat”²³, misalnya. Padahal, “Keberagaman Gender dan Seksualitas” justru tidak ditemukan di Barat, melainkan di bumi Nusantara ini²⁴, dimana apa yang dimaksud --dalam hal ini adalah “Keberagaman Gender” [sendiri tanpa seksualitas]-- adalah hal yang tidak selalu dapat ditemui di setiap masyarakat atau di setiap budaya. Jadi, ketika kita mengatakan “Gender” atau “Gender dan Seksualitas”, harus disertai dengan kehati-hatian yang mana yang dimaksud?

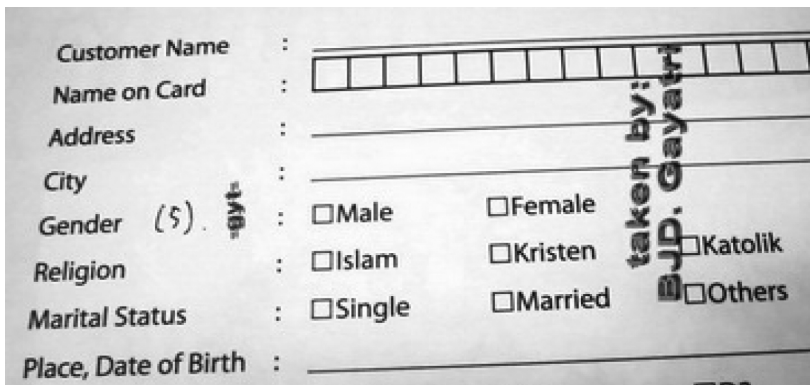
‘Pleasure-Danger’; Seksualitas Perempuan antara Kenikmatan dan Bahaya

Layaknya pepatah, “Banyak jalan menuju Roma”, banyak disiplin ilmu membedah “Gender dan Seksualitas” dewasa ini, khususnya dalam kurun empat dekade belakangan ini, dengan sangat intensnya. Tidak ketinggalan, para pembahas adalah para feminis akademisi maupun aktivis --yang juga pemikir serius-- (lihat juga catatan akhir no. 27 di bawah ini). Adalah Charlotte Bunch, feminis-aktivis yang banyak menulis memperkenalkan istilah “Preferensi Seksual” (*Sexual Preference*). Istilah ini lebih menunjukkan dan menyatakan “Politik-

Seksual” (*Sexual-Politics*) seseorang, ketimbang hanya sekedar mengandalkan dan berpijak pada orientasi seksual. Menurut Bunch, seseorang dapat saja mempunyai orientasi seksual yang bukan heteroseksual, namun pada akhirnya memilih (*prefer*) untuk ‘tunduk’ di bawah “rezim-heteroseksual”, dengan misalnya menikah dan melahirkan anak, karena adanya tekanan-tekanan sosial (*social pressure*), baik berupa aturan atau nilai-nilai di dalam masyarakat maupun keluarga

yang tidak memungkinkan bagi seseorang untuk memilih orientasinya yang nonhetero (Bunch, 1972²⁵). Istilah ini, masih sering digunakan, khususnya dalam konteks untuk menunjukkan sikap politik(-seksual) yang benar (“*Politically-Correctness*”²⁶) dihadapan para “rezim-heteronormativ”. Para feminis-aktivis yang juga pemikir dan pembuat teori seperti: Monique Wittig atau Judith Butler²⁷.

Pada sebuah acara pelatihan membangun kapasitas organisasi, dengan topik



Gambar 1. Memperlihatkan bahwa gender disamakan dengan jenis kelamin. Didapatkan baru-baru ini dari sebuah toko waralaba bukan asal Indonesia

Sementara istilah “gender” adalah hal yang abstrak karena istilah ini bukan menunjuk pada sebuah konsep yang akan secara menetap dan pasti menunjuk pada sebuah benda tertentu, seperti halnya alat kelamin dalam pengertian jenis kelamin²².

Gambar dibawah ini menambah daftar dari salah kaprah yang dimaksud, bahwa terminologi gender

“Seksualitas”, penulis memperkenalkan relasi “SnM/BnD”²⁸ kepada peserta-latih. Beberapa peserta-latih dengan serta-merta ‘nyeletuk’ atau berkomentar-tanya: “...iiih kayak gitu itu, normal nggak siih?..”. Penulis tidak terlalu heran dengan ‘celetukan’ itu, namun menyadari, betapa ‘gap’ atau jarak pemahaman tentang “Keberagaman Gender dan Seksualitas” begitu jauhnya. Termasuk bagaimana untuk tidak bersikap *judgemental*/menghakimi sesuatu bentuk relasi-seksual sebagai “normal” (baca: tidak menyimpang) atau tidak²⁹.

Catatan harian perjalanan dari Lampung, Oktober 2005

Ketika seseorang bertanya mengenai sebuah hubungan seksual yang “normal” dan “tidak-normal”, inilah politik. Kedengarannya seperti penghakiman psikiater atau psikolog-klinis yang sedang menilai, apakah seseorang “normal” (baca: menjadi heteroseksual), karena tunduk dan konfirm/patuh pada nilai-nilai heteronormativitas atau tidak. Sama halnya, vis-à-vis ketika seseorang mengidentifikasi dirinya sebagai feminis. Tapi, feminis yang mana, dengan pemikiran feminisme yang seperti apa?

Barangkali di antara kita sering mendengar ucapan: “feminisme gelombang ketiga”, tanpa tahu konteks dan asal muasalnya. Seperti halnya, ketika seorang kawan menyatakan kepada penulis, hendak menonton film “*Sex and the City*”, karena film ini merupakan produk dari feminisme gelombang ketiga. Namun ketika penulis tanyakan lebih jauh, apa yang kawan ini maksudkan dengan “feminisme gelombang ketiga” tersebut? Apakah karena empat tokohnya adalah para perempuan berkarier? Atau karena seronok menampilkan konsumerisme dunia fesyen? Kawan ini tidak dapat menjelaskan lebih lanjut. Padahal film “*Sex and the City*” sesungguhnya tidak sungguh-sungguh mewakili pemikiran-pemikiran yang dilontarkan oleh para feminis pencetus gelombang ketiga feminisme. Namun lebih mewakili “*the new shopping-and-fucking feminism*” (lihat juga: Michelle Goldberg, 2001), alias feminis-korban-konsumerisme.

Betul bahwa feminisme gelombang ketigalah yang mencuatkan “positif-seks” (“*sex positive*”), termasuk positif terhadap “SnM/BnD”, positif untuk dimensi relasi butch-femme yang sering dikritisi para feminis yang lainnya sebagai perpanjangan tangan dari relasi yang patriarkis dalam relasi perempuan-dengan-perempuan (“*female-to-female-relationship*”), positif terhadap perempuan yang memilih (*prefer*) untuk

menjadi pekerja seks, positif terhadap kehidupan-seksual yang non-monogami atau bahkan bagaimana seorang feminis dapat tidak anti-pornografi malahan menjadi pro-pornografi? Lantas, bagaimana atau darimana feminisme gelombang ketiga ini sebetulnya bermula? Dan apa saja buah pemikirannya?

Begini ceritanya. Secara berkala, para feminis di Amerika Serikat, baik feminis yang berlatar belakang akademis (atau feminis-teoritis) maupun feminis aktivis³⁰ (atau feminis-praktis), bertemu dalam sebuah ajang konferensi feminis tahunan yang adalah khas milik feminis di Amerika Serikat/A.S. Pada konferensi Kesembilan Para Akademisi dan Para Feminis (atau “*The ninth The Scholar and The Feminist conference*”), kelompok perencana konferensi menggagas tajuk konferensi, yaitu: “*Towards a Politics of Sexuality*” (harafiah berarti: “Menuju sebuah Politik Seksualitas”). Konferensi masih enam bulan ke depan, Makalah-Konsep (*Concept Paper*, semacam Juk-Laknya) baru saja diluncurkan. Namun dengan serta-merta respons yang kontroversial menyeruak, terutama di antara feminis yang anti-pornografi dengan feminis yang pro-pornografi. Lho? Nggak salah nih kok feminis pro-pornografi?

Di era 80-an, di A.S., adalah duet Andrea Dworkin dan Catherine MacKinnon yang berupaya melawan industri pornografi dengan mengegolkan Undang-undang Anti-pornografi (*Antipornography Civil Rights Ordinance*)³¹. Narasi pornografi di era ini adalah: pornografi telah mengobjekkan perempuan dan anak sebagai objek seksual. Pornografi juga menjadi tertuduh utama penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*). Periode tersebut memang merupakan periode kampanye besar-besaran melawan “kekerasan terhadap perempuan”, baik di A.S., juga di berbagai belahan dunia, yang dilakukan oleh mayoritas organisasi-organisasi perempuan, termasuk oleh badan-badan internasional, multilateral dan PBB, sambil mengucurkan dananya. Kampanye ini juga dipahami sebagai dampak dari serial “Konferensi Dunia tentang Perempuan”³², yang hendak memberi penguatan (*empowerment*) kepada perempuan. Bahwa industri pornografi di A.S. memang meraup untung besar-besaran dari bisnis “mengobjekkan perempuan sebagai objek-seks” tersebut, itu juga merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari.

Masih di-era yang kurang lebih sama, di sisi lain untuk kelompok feminis-radikal³³, juga menentang kekerasan terhadap perempuan dan mengisi narasi seksualitas melalui majalah “*Off-Our-Back*”. Konteks

"*Off-Our-Back*" adalah karena begitu banyaknya label (stigma) atau stereotip yang diberikan oleh "kelompok-Kanan" baik kepada feminis-radikal juga untuk para feminis yang lain termasuk yang hetero. Sehingga, konteks "*Off-Our-Back*" ini juga digunakan oleh feminis/aktivis perempuan yang heteroseksual untuk menyatakan "jangan melabel kami", karena oleh *mainstream* dan "kelompok-Kanan" dibuat citra stereotip bahwa para feminis (dan aktivis perempuan) adalah lesbian. Pengertian "*Off-Our-Back*" ini sendiri, adalah: bayangkan di punggung anda, tiba-tiba seseorang menempelkan sebuah label, "LESBIAN", misalnya. Pernyataan "*Off-Our-Back*" bermakna: copot semua label dari punggung kami.

Dalam realitas sosial seperti ini, feminisme di A.S. [juga Kanada, negara tetangganya] terus-menerus berdialektik dengan narasi --besar dan kecil--pewacanaan gender dan seksualitas³⁴. Dalam konteks realitas sosial seperti itulah, para anggota perencanaan Konferensi kesembilan Feminis di A.S. ini menggagas konsep, meredefinisi seksualitas bagi perempuan, termaktub isu mengenai: pornografi; "SnM/BnD"; prostitusi; non-monogami; butch-femme; dan lain sebagainya. Semua dimaknai secara baru, perspektif positif-seks bagi keberubuhan perempuan. Tak ayal, sebelum konferensi diadakan, telah terjadi pro-kontra dimana para feminis (di A.S.) menjadi terpecah dua. Di satu sisi adalah tentangan para feminis anti-pornografi dan kelompok anti bentuk-bentuk relasi-seksual "SnM/BnD" yang dianggap sebagai kekerasan (terhadap perempuan). Di sisi lain, kelompok feminis yang pro terhadap redefinisi atau mendefinisikan ulang terhadap politik-seksual bagi perempuan dan menjadikan positive-seks[ual] terhadap keberubuhan perempuan. Dalam pernyataan penyesalan panitianya, --tetapi lebih merupakan olok-olok balik kepada kelompok penentang-- yang menyatakan bahwa panitia (dianggap) pro-kekerasan terhadap perempuan (karena mendukung pornografi), justru dari pihak panitialah yang paling banyak dirugikan dan mendapatkan perlakuan kekerasan. Dimana sejumlah dokumen untuk peserta konferensi dimusnahkan (oleh kelompok penentang), penyerangan terhadap beberapa individu pemakalah konferensi, hingga ancaman serius dari Yayasan Helena Rubinstein penyokong dana konferensi yang menarik bantuan dananya. *But the show must go on*, acara tetap berjalan. Bagaikan kisah wayang, kehebohan yang terjadi justru menjadi "kawah candradimuka" bagi kelahiran baru sebuah pemikiran yang menghempas gelombangnya

bukan hanya mengimbas di negeri kelahirannya, namun menghempas secara global menjadi "Gelombang Ketiga Feminisme". Dari gelombang ini pulalah lahir Teori Queer, juga kesadaran politik "*People of Colour*" ("Masyarakat Warna-warni") di A.S. dan Kanada, tapi penulis tidak akan membahas disini, karena ruang yang terbatas.

Kritik terhadap patriarki yang signifikan sekaligus evaluatif dilontarkan oleh Carole Vance (dan kawan-kawan), dirangkum dalam kata pengantarnya³⁵ yang padat, bernas, lugas, cerdas serta pedas, antara lain berbunyi:

"... jika perempuan "baik" (sudah disunat), laki-laki akan melindungi mereka; jika mereka tidak [menurut], pria perlu mengerasi dan menghukum mereka. Sebagai bagian dari sistem ini, perempuan "baik" punya kepentingan untuk menahan dorongan seksual pria, sumber bahaya bagi perempuan, serta [menahan] seksualitasnya sendiri yang mungkin telah menghasut pria untuk menyerang mereka. ... Feminis abad sembilan belas mengelaborasi aseksualitas sebagai opsi untuk menjadi perempuan yang dihormati (*respectable*) menggunakan ketidak-gairahan perempuan dan menahan dorongan seksual pria untuk [seolah] menantang prerogatif seksual pria. Gelombang kedua feminisme menuntut dan memenangkan peningkatan otonomi seksual bagi perempuan dan mengurangi "perlindungan" pria tetap dalam kerangka patriarkal. Di tengah perubahan yang terus-menerus ini, banyak perempuan merasa lebih terlihat secara seksual, namun rentan. Meski [telah] mematahkan tawar-menawar lama yang menempatkan keselamatan kebebasan seksual pada posisi berlawanan, namun ketakutan perempuan pada pembalasan dan penghukuman untuk aktivitas seksual mereka belum mereda."³⁶

Jadi, di satu sisi, yang harus mengontrol dorongan seksual para pria adalah perempuan, sementara di lain sisi, perempuan juga tidak boleh mengemukakan hasrat-hasrat seksualnya, atau menjadi aseksual atau selibat saja, karena akan membuat menjadi sasaran kekerasan (seksual) terhadap perempuan. Seolah seperti, perempuan boleh pakai rok mini, tapi di dalam rumah saja. Sebab, kalau digunakan di luar rumah akan mengundang pelecehan seksual atau bahkan perkosaan. Masih ingat kasus "rok-mini", yang disambut protes kelompok perempuan melawan Foke karena pernyataannya yang menyalahkan

perempuan, beberapa tahun lalu? Apa yang menjadi kritik yang dilontarkan di A.S., ternyata juga berlaku secara global, termasuk di Indonesia dimana pemikiran Foke juga M. Nuh (mantan Menteri Pendidikan Nasional) mewakili pemikiran konstruksi seksualitas yang patriarkis, yang dikritik oleh Vance dkk. tersebut. Sehingga tidak bisa dikatakan jika terdapat perempuan di Indonesia yang setuju kepada pemikiran kritis feminisme, ini hanya sekadar merupakan pemikiran “Barat” yang diimpor. Bagaimana dengan pemikiran Foke dan M. Nuh, pemikiran impor jugakah?

Dialektika yang ditawarkan oleh Konferensi Seksualitas Barnard --demikian konferensi itu sering disebut-- dalam rangkuman kata kuncinya untuk seksualitas perempuan adalah, misalnya: Restriksi - Represi - Bahaya. Dimana seksualitas perempuan selalu dalam “aturan” atau restriksi. Selalu diatur-atur, sementara tidak ada aturan untuk mengatur seksualitas para lelaki. Bagaimana seksualitas perempuan perlu “direpresi” agar tidak mengundang atau menghasut hasrat lelaki agar tidak bertindak melecehkan atau bahkan memperkosa. Karenanya seksualitas perempuan selalu dalam “bahaya”. Kata kunci yang lainnya, misalnya, di dalam ranah (domain) di atas tersebut adalah: Eksplorasi - Kenikmatan (*Pleasure*) - Agensi (sebagai “*Sexual-Agency*”). Jika feminisme dianggap sebagai “barang impor”, mengapa pemikiran yang menindas seksualitas perempuan, tidak dianggap sebagai impor juga? Bagaimana bisa laki-laki di Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh pernyataan Foke dan M. Nuh, dapat sama-sama merestriksi, merepresi, mengatur-atur seksualitas perempuan?

Yang menarik, Vance dkk., selain mengkritik bahwa teori-teori (“gender dan seksualitas”) yang serba canggih itu, seringkali tidak disertai dengan data-data yang adekuat untuk mendukung teori-teori tersebut³⁷, dia juga mengajukan beberapa parameter untuk mempertanyakan dan membongkar kembali wacana seksualitas perempuan, yang boleh dibilang semacam indikator penyusunan kembali hipotesis pewartakan gender dan seksualitas dari sudut pandang feminisme³⁸. Parameter ini yang Vance sebutkan sebagai tindakan meredefinisi wacana feminisme selama ini, yaitu³⁹:

- a. Apakah alam seksualnya laki-laki (*male*) dengan perempuan (*female*) secara esensi berbeda ataukah merupakan produk yang dari sejarah dan budaya berbeda?
- b. Apakah seksualitas perempuan telah dibisukan

oleh represi, atau seksualitas perempuan memang berbeda dari seksualitas laki-laki?

- c. Apakah sumber bahaya seksual kepada perempuan didasari dalam agresif yang intrinsik ataukah dari alam kelelakian (jantan), atau di dalam kondisi patriarkal yang mensosialisasi seksualitas kelelakian (kejantanan) untuk mengagresi seksualitas perempuan demi patuh dan tunduk [di bawah seksualitas kelelakian]?
- d. Bagaimana kekerasan seksual laki-laki bisa dikurangi atau dihilangkan?
- e. Bagaimana kemungkinan seks yang bersifat prokreasi dapat masuk ke dalam pengalaman seksualitas perempuan?
- f. Apakah feminisme perlu mempromosikan (memperkenalkan) diferensiasi maksimum atau minimum di dalam lingkup seksual, dan bentuk-bentuk apa saja dari masing-masing visi yang perlu diambil. [Visi yang maksimum atau yang minimum]?

Siapa tahu, kita di Indonesia bisa menggunakan dan mengembangkannya juga untuk kajian gender dan seksualitas, khususnya seksualitas perempuan di sini.

Konferensi ini juga memberi kesempatan kepada para peserta untuk menggali kehidupan seksualnya sehari-hari, dan beberapa peserta telah membukukan kumpulan catatan harian. Apa yang dilakukan disini, untuk membuka tabir kehidupan seksual, mungkin bagi sebagian orang dianggap biasa. Namun, bagi kebanyakan orang, berbagi pengalaman (kehidupan) seksual akan dianggap: tabu; atau memuakkan dan menjijikkan; atau berbagi cerita porno ala “stensilan”⁴⁰ alias cabul! Padahal “stensilan” sesungguhnya adalah kategori cerita erotis. Tapi begitulah, masyarakat awam di sini, apalagi juga kelompok moralis --akibat “panik-moral”-- belum bisa membedakan antara erotika dan pornografi. Sayangnya buku kumpulan catatan harian tersebut, yang sedianya akan dibagikan untuk peserta konferensi, termasuk yang dimusnahkan oleh kelompok kontra konferensi, karena dianggap mengumbar kecabulan dan sesat (*pervert*).

Bagaimana tidak dianggap sesat (*pervert*), jika konferensi ini mengakomodasi pornografi dan “SnM/BnD”, misalnya, yang bagi sebagian besar dari antara kita, seperti peserta latih di Lampung itu atau bahkan di A.S., menilai atau beranggapan bahwa hal tersebut adalah “tidak-normal”. Daftar kesesatan itu masih ada lagi, yaitu bagaimana [pemikiran dan

wacana] konferensi ini mengakomodasi topik-topik "perversion" (kesesatan)⁴¹ yang lainnya, seperti: prostitusi; non-monogami; dan banyak hal lain yang selama ini dalam bayang-bayang gelap rahasia seksual-dan-seksualitas manusia. Secara tidak langsung, konferensi ini juga telah menggarisbawahi dan menekankan kembali hukum dasar untuk relasi-seksual yang baik dan setara, yaitu: "sex by consent" atau maksudnya adalah relasi seksual harus atas dasar kesepakatan kedua-belah pihak. Jika relasi-seksual tanpa "consent" atau kesepakatan, maka itu adalah perkosaan. Hal ini muncul di permukaan, karena hukum dasar, atau dasar *code of conduct*, para pelaku seks-keras atau "SnM/BnD" adalah "consent" itu⁴².

Dari banyak pertanyaan, diluar pernyataan penghakiman soal "normal" atau tidaknya relasi-seksual dalam "BnD/SnM" tersebut, yang kok bisa diterima oleh ideologi feminisme adalah: bagaimana seorang feminis bisa menerima kekerasan (seksual); atau dimana letak feminisnya dari relasi seks-keras tersebut? Jawabannya ada pada asumsi dasar feminisme melihat seksualitas itu sendiri. Dimana relasi-relasi seksual merupakan konstruksi sosial. Penulis berkenalan dengan fenomena "SnM" yang bukan dalam relasi-seksual, justru di bumi nusantara ini, tepatnya di tanah Papua.

Peringatan 50 tahun masyarakat suku Yaghai dan Auyu berdamai akan berlangsung beberapa hari lagi. Penulis mendampingi Prof. Jan Boelaars, sang "ahli-Papua-Selatan", sebagai asisten kedua untuk penelitian pos-doktoral beliau, kembali ke suku dampingannya. Pastor Boelaars mengingatkan, "...ada kapal datang!", dan penulis harus melihat bagaimana pertemuan atau reuni keluarga besar suku Auyu, yang lima puluh tahun lalu masih saling berperang dan mengayau dengan suku Yaghai, namun sekarang hidup damai berdampingan. Di bagian darat rombongan penyambut sudah berkerumun, sementara kapal sedang merapat. Belum selesai kapal merapat, masing-masing orang, baik yang ada di dalam kapal maupun yang di darat sudah saling berteriak memanggil kerabat yang mereka cari. Ada beberapa orang mengatur rombongan yang berada di darat agar menjauh dari tempat kapal merapat, untuk memberi tempat, bagi muatan barang-barang yang akan dikeluarkan dari kapal. Orang-orang mundur, tapi

teriakan-teriakan memanggil masih terus berlangsung. Gaduh sekali, saling bersaut-sautan. Setelah barang dikeluarkan, barulah orang-orang dari kapal naik ke darat, karena kapalnya ada lima meter --mungkin lebih-- di bawah dari daratan. Berhamburan mereka sambil satu sama lain saling berteriak-teriak. "Lihat dan perhatikan baik-baik", kata Pastor Boelaars kepada penulis dan asisten satu peneliti. Betul penulis kaget, dan mengerti kenapa Pastor Boelaars memaksa kami untuk menyaksikan reuni tersebut. Karena apa yang terjadi di hadapan adalah orang-orang saling baku-pukul dan baku-tendang, sambil beteriak-teriak. Lebih tepatnya memaki, kalau pakai kosa-kasa orang Jawa. Laki-perempuan sama saja, baku-pukul, baku-tonjok, baku tendang, sambil tak lupa baku-memaki! Gila! Penulis --yang dibesarkan dalam tradisi halus Jawa-- sedikit mengalami gegar budaya, terpana tak percaya. "...Semakin rindu mereka, semakin sayang dan cinta kepada saudaranya, pukulan tendangan dan makian harus semakin keras...", begitu Prof. Boelaars menjelaskan, ketika penulis menanyakan konteksnya. -disarikan dari catatan lapangan/harian, Mindiptana-Papua Selatan, Oktober 1987-

Pengalaman di Mindiptana tersebut, baru terjelaskan dan dipahami, setelah penulis belajar konteks "SnM" di kemudian tahun. Relasi-seksual adalah kenikmatan (*pleasure*). Pada suku di Papua, kenikmatan tersebut --dalam hal ini perwujudan rasa rindu, kasih-sayang, dan cinta-- didapatkan dari pukulan dan tendangan. Sementara untuk para pengikut "SnM/BnD", kenikmatan didapatkan dari cambukan, guratan atau cakaran --yang kadang-kadang hingga perlu mengeluarkan darah--, dari diikat atau ditindik. Dimensi kebertubuhannya adalah, bagaimana seseorang, khususnya perempuan, untuk mengenali apa yang tubuhnya inginkan atau senang. Apa yang seorang perempuan bisa nikmati dari relasi-seksualnya dan mengeksplorasi tubuhnya untuk kenikmatan seksualnya?

Penulis belajar serius untuk mampu memahami dimensi ini, karena dibesarkan dalam tradisi halus Jawa tersebut. Secara intelektual dan kognitif bisa memahami, secara sikap bisa menerima dimensi seks-keras, namun gagal total ketika mengeksplorasi agar mampu menikmatinya. Secara pribadi (personal), meninggalkan pertanyaan, apakah karena

konstruksi budaya Jawa --yang penulis internalisasi-- yang tidak pernah memperkenalkan seks-keras ini membuat penulis tidak mampu menikmati? Ataukah karena terlalu terlibat pada beberapa kasus KDRT dan/atau wacana feminisme telah membuat kontrol-aversiv (*aversive-control*) sehingga tubuh menolak dengan sendirinya? Jadi, apakah relasi-seksual, seks-keras atau seks-lentur (*vanilla-sex*), begitu istilahnya dalam Bahasa Inggris) produk dari konstruksi sosial, atau hasil dari apa? Mengingat pada apa yang ditulis Vance:

Teori konstruksi sosial mengalami interpretasi salah arah. Dengan menyarankan bahwa jika seksualitas dikonstruksikan pada tingkat budaya, maka hal tersebut dapat dengan mudah direkonstruksi atau didekonstruksi pada tingkat sosial atau pribadi. Tidak selalu demikian. Analog budaya berguna disini, karena meski budaya manusia itu sewenang-wenang dalam tingkah laku yang dipelajari dan yang tidak intrinsik, para antropolog tidak percaya bahwa seluruh budaya dapat mengubah dalam semalam, atau seseorang yang disosialisasi dalam satu tradisi budaya dapat berakulturasi atas kemauannya sendiri. Seksualitas yang berubah-ubah pada sepanjang seseorang hidup merupakan pertanyaan yang menarik dan penting, bagaimanapun". (Vance, 1992, hal. 9).

Salah satu "kesesatan" --dari banyaknya "kesesatan"-- dari konferensi ini, yang hendak penulis kemukakan disini adalah pornografi⁴³. Konferensi mendukung dan menerima pornografi bukan karena hendak mendukung bisnis pornografi (di A.S.) yang selama sudah ada dan sudah jelas mengobjekkan dan mengeksploitasi perempuan sebagai objek seks, demi kepentingan hasrat seksual para lelaki semata. Hal yang disalah-mengerti oleh kelompok kontra, khususnya dari kelompok feminis anti-pornografi yang sempat nyaris membubarkan konferensi dengan aksi kekerasannya (penulis membayangkan seperti keadaan kongres ILGA-Asia, tahun 2010, di Surabaya, yang benar-benar dibubarkan oleh kelompok Islam garis keras). Bagi Vance dkk., bagaimana meredefinisikan pornografi yang justru mengakomodasi hasrat-hasrat seksual perempuan yang berbeda dari lelaki, pornografi yang menempatkan perempuan sebagai subjeknya bukan objek, yang juga memungkinkan perempuan dapat

mengeksplorasi seksualitasnya dan kenikmatan yang dipilihnya. Adalah kemudian majalah "*On Our Back*" bersama "*Bad Attitude*" (harafiah: "Sikap Buruk") menyambut perihal "*sex-positive*" yang dicuatkan oleh konferensi ini. Dengan konteks, tidak takut dianggap bukan perempuan baik-baik ("*Bad Girl*") karena seksualitasnya, kedua penerbitan ini kemudian memproduksi literatur erotis dan pornografis, tapi yang khusus untuk eksplorasi seksualitas perempuan. Bahwa laki-laki hendak turut menikmati, ya silahkan saja.

Penulis menghadirkan "*Pleasure and Danger*" --anak buah pemikiran-- dari Konferensi Seksualitas Barnard ini, karena wacana mendasar ini sering luput dari refleksi para aktivis perempuan di Indonesia yang belum tentu feminis itu. Atau kalau mengaku feminis, seringkali tak paham apa itu feminisme. Bagaimana banyak aktivis perempuan ketakutan untuk dilabel atau dicap "bukan perempuan baik-baik", dalam kategori ini adalah lesbian [dan janda] (lihat: Sulistyowati 2010). Di antara para aktivis perempuan itu ketakutan untuk dilabel stereotip bahwa feminis adalah: perempuan tidak sudi menikah (tapi mau seks); perempuan pembenci laki-laki; perempuan judes; dan lesbian; dan seterusnya. Sibuk untuk membersihkan punggung mereka dari label-label yang diberikan oleh *mainstream*, "*Off Our Back*", atau masyarakat yang berbudaya patriarkis-heteronormativ dan merepresi perempuan.

Keberagaman Gender dan Seksualitas

Masyarakat dalam budaya Jawa, mengenal kata, misalnya, "banci" atau "wandu"⁴⁴ sebagai identifikasi yang non-feminin atau non-maskulin. Kata "banci" sudah dikenal sejak lama, catatan yang saya temukan, kata ini sudah digunakan sejak awal abad dua-puluh⁴⁵ (Hooykas 1949). Sementara "wandu" adalah perempuan yang tampak tidak feminin dan bertulang besar seperti laki-laki, namun belum tentu 'tomboi'⁴⁶. Kata atau istilah mewakili sebuah identifikasi, terlepas apakah indentifikasi tersebut adalah sebuah benda (yang konkret) atau sebuah fenomena (yang abstrak). Studi atau kajian mengenai "banci" atau "wandu" yang secara serius belum ada yang mengemuka, kecuali fenomena yang ada di Sulawesi Selatan, misalnya. Padahal fenomena ini merupakan bagian dari budaya kita sendiri. Sekonyong-konyong mencerap kata "*cross-dress*" (arti harafiah: bersilang pakaian atau tampilan) atau "*gender-blended*" (harafiah: gender-campuran) dengan begitu saja dan dengan serta merta memasukkannya dalam kategori

“Gender-Ketiga” ini, meski sesungguhnya masing-masing dari padanya memiliki konsep dan konteksnya sendiri. Seakan, semua jenis yang tidak masuk dalam jenis kelamin perempuan atau laki-laki lantas masuk dalam kategori “Gender-Ketiga” ini.

Ilmu-ilmu Antropologi dan Etnologi (atau Etnografi) merupakan salah satu disiplin ilmu yang banyak mengkaji topik “[keberagaman] Gender dan Seksualitas”. Entah signifikan entah kurang pengaruhnya dari pewacanaan narasi gender dan seksualitas dari Konferensi Seksualitas Barnard terhadap kajian ini, yang jelas para akademisi dan cendekia Barat untuk disiplin ini memang semakin heboh mengkaji fenomena “Keberagaman Gender dan Seksualitas” di luar dari kebudayaan dan fenomena masyarakat mereka. Topik “Keberagaman Gender dan Seksualitas” ini dibedah, ‘dibedel-bedel’, dianalisis yang tentunya dengan “kaca-mata Barat” mereka, memunculkan narasi-narasi, seolah-olah mereka yang menemukan, padahal fenomena budaya itu sudah ada sebelum mereka datang meneliti.

Sebagai contoh seorang *scholar* (atau akademisi) Barat menulis artikel yang menyatakan, jika masyarakat sudah dapat mengidentifikasi gender ketiga atau keempat [bahkan jika sudah mengakuinya], maka masyarakat tersebut sudah menuju kepada masyarakat yang modern⁴⁷ (Trumbach, 1994. Lihat juga diskusi selanjutnya). Artikelnya bertajuk: “*London’s Sapphists: From Three Sexes to Four Genders in the Making of Modern Culture*”⁴⁸. Padahal, di lain sisi seorang *scholar* (akademisi) yang lain menyatakan: “.. *The concepts of “third”, “fourth” and “some” genders can be somewhat difficult to understand within Western conceptual categories.*” Atau: “.. Konsep dari gender “ketiga”, “keempat” dan “yang-lainnya” agaknya dapat sulit dimengerti di dalam konseptual Barat (McGee and Warms, 2011). Jadi, konsep gender yang lebih dari tiga saja, selain sulit dimengerti, sesungguhnya juga harus tetap dicurigai (atau diwaspadai) karena akan membawa “bias-[nilai-nilai]-Barat” mereka. Kalau tidak hendak penulis katakan sebagai modus “*sexing the gender*”⁴⁹, yang sekadar kegenitan akademisi, seperti yang sudah penulis nyatakan di bagian awal artikel ini⁵⁰.

Apakah [para *scholar*] Barat identik dengan kesahihan ilmu pengetahuan (sains) karena mereka memiliki metodologi? Padahal, metodologi adalah alat pembuktian dari struktur logika narasi pewacanaan (*discourse*) yang bisa dibuat oleh siapapun sejauh dia memang *scholar* (akademisi). Mengapa kita harus [hanya] menunggu “*scholar*”-

Barat” untuk pengidentifikasian sebuah fenomena budaya yang sudah kita miliki sejak puluhan atau bahkan ratusan tahun. Atau kita tidak mampu untuk berefleksi, berdialektik dan bertumbuh dari akar budaya sendiri? Sehingga ketika “Gender-Ketiga”⁵¹ heboh diadvokasi, untuk mendapat pengakuan dalam status hukum oleh negara seperti Australia atau India, dan seluruh dunia kemudian mengikuti arus gerakan ini, kita di Indonesia jadi latah. Nah, bagaimana dengan fenomena lima gender yang dimiliki budaya bangsa ini?

Fenomena budaya di Indonesia, baik yang ada di Jawa maupun yang ada di budaya lain di wilayah nusantara ini, khususnya dalam hal ini penulis maksudkan dari wilayah Sulawesi Selatan, yang teridentifikasi terdapat lima jenis gender (lihat: Davies 2007; juga: Graham, dalam *Inside Indonesia*, 2001). Oleh karena yang menuliskan identifikasi ini adalah seorang *scholar* (akademisi) dari Barat, maka menjadi sahlah identifikasi lima gender masuk dalam wacana dunia, sementara sesungguhnya, budaya tersebut sudah berlangsung selama berabad-abad di Sulawesi dan mungkin juga di belahan lain budaya-budaya yang ada di bumi nusantara ini, yang belum kita (*scholar* Indonesia maupun asing) berhasil identifikasi dan mungkin saja kemudian terdapat yang sudah raib di makan jaman. Jika di Barat – mungkin-- keberagaman atau “Gender Ketiga” ini merupakan bagian dari budaya baru, yang dianggap modern. Sementara untuk beberapa budaya yang ada di bumi Nusantara ini merupakan bagian dari kearifan lokal yang sudah ada sejak jaman pra-modern. Dan kearifan lokal ini semakin jauh dari penerimaan diri sendiri, karena kehadiran “Barat” yang lain (apakah itu ilmu pengetahuan, apakah itu pengaruh budaya dari Timur Tengah) yang meminggirkan, bahkan menolak dalam bentuk aturan-aturan. Suka atau tidak, sadar atau tidak, pewacanaan “(Gender dan) Seksualitas” menjadi sangat *‘singularly heteronormative’* di Indonesia, dan menindas gender itu sendiri menjadi hanya laki-laki dan perempuan karena pengaruh dan tekanan oleh penyebaran agama dan kolonialisme. Dimana pada paska-kolonial, dipengaruhi oleh *‘sexual-politics’* oleh berbagai pranata sosial, termasuk pranata agama dan politik praktis, yang menjadi *‘stakeholder’* dari *‘power contest’* politik seksual yang merepresi tersebut⁵².

Sementara pewacanaan mengenai Gender belum secara radikal-mengakar dipahami secara universal, kebutuhan pengakuan identitas demi hukum mengemuka dan ‘dianggap’ darurat (*emergency*), oleh

para aktivis SOGIE-HAM. Khususnya, ketika Australia dan India kemudian secara hukum mengakui kategori 'Gender-Ketiga' ini -- di India dikenal konsep 'Hijra'⁵³--, maka lantas aktivis SOGIE-HAM (sedunia) menuntut dan mengadvokasi untuk pentingnya pengakuan di mata hukum untuk 'Gender-Ketiga' di negaranya masing-masing, terlepas apakah itu fenomena tradisi budaya 'Hijra' seperti India atau fenomena sosial yang dianggap modern seperti Australia (lihat diskusi pada alinea di bawah ini). Memperbandingkan dengan negara Kanada, misalnya, yang secara aklamasi di seluruh negara bagiannya menerima dan mengadopsi "Undang-undang Kesetaraan Gender" ("*Gender Equality Law*") dalam arti luas karena memiliki '*Native America*' (harafiah: "Orang Asli Amerika") yang mempunyai tradisi '*Berdache*' (semacam 'Bissu' di Sulawesi Selatan). "Undang-undang Kesetaraan Gender" ini merupakan bentuk pengakuan dan perlindungan hukum yang lebih perlu (*necessary*) ketimbang sekadar mengakui keberadaan "Gender Ketiga" sebuah identitas namun tanpa perlindungan hukum. Sehingga ketika miss Universe Kanada ternyata adalah seorang perempuan non-biologis (atau seorang *Male-to-Female*), dimana kemudian dia ditolak oleh panitia Miss Universe internasional yang berasal dari Amerika Serikat, maka gugatan Miss Universe Kanada diterima oleh pengadilan Kanada dan panitia Miss Universe internasional harus membayar denda. Dibalik dari kasus ini, khususnya untuk Kanada, hal ini merupakan proses panjang edukasi rakyat dan publik Kanada untuk dapat menerima ide dan pemahaman kesetaraan gender (*gender equality*). Konsep hukumnya pun dikerjakan dengan serius oleh seorang Hakim Agung Kanada, The Honourable Madam Justice Rosalie Silberman Abella, yang menuturkan pengalamannya mengonsepskan selama lebih dari satu dekade⁵⁴.

Akan halnya di Australia, pengadilan tinggi (di New South Wales, salah satu Negara bagian di Australia) menetapkan keputusan bahwa New South Wales harus mengakui [status sebagai] seorang gender ketiga setelah menangani lama kasus Norrie, yang telah bergulat sejak 2010 untuk melakukan perubahan jenis kelamin sebagai "non-spesifik" (The Guardian, 2 April 2014. Lihat kutipan asli pada catatan akhir)⁵⁵. Sementara untuk India, merupakan sejarah fenomena budaya di India (dan Pakistan) tentang *Hijra*, yang mengajukan tuntutan untuk diakui sebagai gender ketiga dalam status hukumnya

(The Guardian 16 April 2014⁵⁶). Bagi Indonesia, kasus memberikan kolom pada hal yang "bukan-ini-bukan-itu", seperti yang terjadi pada kolom agama untuk dikosongkan, misalnya.

Sialnya, ketika kategori 'Gender-Ketiga' ini kemudian diadvokasi untuk masuk dalam ranah hukum sebagai sebuah identitas [gender, sebagai pengganti identitas seks/jenis kelamin biologis], yang selama ini sudah dikenal, sementara masyarakat dan pranata-sosialnya belum siap dengan pemahaman gender atau bahkan tidak mengenal budaya keberagaman gender yang dimiliki Indonesia, hal ini seakan seperti gerakan "bunuh-diri" aktivis SOGIE-HAM. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan [masyarakat dan pranata-pranata sosial] Indonesia sendiri? Khususnya hal yang berkaitan dengan "Gender dan Seksualitas", karena pada beberapa tempat di bumi Nusantara ini dikenal budaya yang mengidentifikasi gender lebih dari dua (Davies, 2007). Sementara dari sudut bahasa, Bahasa Indonesia juga bukanlah jenis bahasa yang mengatur ketat soal maskulin-feminin, seperti pada banyak bahasa di negara-negara Eropa, misalnya, sehingga dianggap sebagai bahasa yang nirgender (*genderless*). Namun, bukan berarti bahwa isu gender bukan menjadi tantangannya sendiri untuk dipahami atau bahkan malahan dideterminasi untuk didiskriminasikan, misalnya.

Sialnya lagi, hukum di Indonesia khususnya masih berbasis pada pembuktian fisik yang faktual atau konkret. Begitu masuk pada pembuktian yang [agak atau bahkan betul-betul] abstrak, maka pembuktian menjadi sulit. Ambil contoh pada kasus perkosaan, yang sudah seringkali terjadi, dimana polisi masih saja meminta bukti fisik di tingkat awal. Sehingga model kekerasan verbal atau kekerasan dalam bentuk ancaman atau ujaran-ujaran kebencian, atau "*power-play*" ("permainan kekuasaan") seringkali tidak dilayani atau ditanggapi oleh polisi, karena tidak bisa digunakan sebagai pembuktian kekerasan atau dianggap tidak ada bukti fisik. Padahal kekerasan verbal dan ujaran-ujaran kebencian, sudah merupakan bukti kekerasan dan ancaman, jika belajar dari kasus hukum di Kanada atau A.S., misalnya. Untuk itu, apakah para aktivis gerakan SOGIE-HAM negeri ini menyadari risiko dan konsekuensi tersebut? Alih-alih mendapat pengakuan hukum, yang terjadi bisa saja sebaliknya, justru menimbulkan diskriminasi yang baru.

Dari Barcelona 1993, Beijing 1995 & Yogyakarta 1998: Gerakan Lesbian di dalam Gerakan Perempuan di Indonesia

“Sisterhood is not nature and something not take for granted” (Sisterhood tidak datang secara alamiah dan bukan sesuatu jaminan [bagi perempuan di ranah politik]), kata Eva K. Sundari kepada penulis di akhir Agustus 2015⁵⁷.

Mirip seperti yang dikatakan Eva, membangun gerakan LGBT *“is not taken for granted”*, tidak dibangun dalam kejapan mata, dimana *‘sisterhood’* juga masih perlu dibangun dengan sangat. Tahun 1995, ketika mayoritas aktivis perempuan se-dunia sedang sibuk mempersiapkan “Konferensi ke-Empat Perempuan se-Dunia”⁵⁸ di Beijing, seorang teman di Indonesia menuliskan gelisahnyanya seperti ini:

“...Sebagai aktivis dalam Chandra Kirana⁵⁹, kami sering bertanya-tanya, dimana tempat kami sebenarnya. Jika kami bergabung dengan gerakan gay laki-laki, kami menjadi “the Second Sex” dan terkooptasi. Jika kami bergabung dengan gerakan perempuan Indonesia, kami menjadi saudara tiri dari gerakan perempuan. Kemana sesungguhnya kami harus bergabung atau berdiri?”

Sedianya, surat kegelisahan dan politis ini akan diterbitkan dalam buletin “Gaya Lestari”, terbitan dari KKCK/“Kelompok Kerja Chandra Kirana”. Sayangnya, menjelang konferensi di Beijing itu “Gaya Lestari” mengalami kemandegan. Penulis merupakan tulang punggung pengatur lalu-lintas “Kelompok-Kerja” sedang terlibat pengorganisasian pengumpulan laporan dari seluruh Asia-Pasifik untuk kondisi global lesbian se-dunia yang diorganisir oleh IGLHRC⁶⁰ (Lihat: Rosenbloom 1995), juga penerbitan lain dalam rangka Konferensi Perempuan di Beijing tersebut (lihat: Reinfelder 1996). Tulisan tersebut dilihat oleh Alison Murray, yang pada saat itu sedang berada di rumah penulis dan sedianya akan membantu penerbitan *newsletter* yang berbahasa Inggris. Enam tahun kemudian di tahun 2001, Murray menyertakan tulisan ini dalam *Inside Indonesia*⁶¹ (lihat: *Inside Indonesia*, Edition 66, Apr-Jun 2001)⁶².

Di tahun-tahun tersebut, mempunyai sebuah organisasi perempuan sebagai payung gerakan perempuan secara nasional adalah sebuah mimpi,

dimana Koalisi Perempuan Indonesia pun belum terpikir. Demokrasi di Indonesia masih di bawah rezim ORBA, meski beberapa aktivis perempuan bahkan telah berpikir untuk mempunyai partai perempuan⁶³. Rezim ORBA yang otoriter dan represif terhadap demokratisasi itu runtuh pun, juga masih merupakan mimpi bagi setiap aktivis yang mengupayakan demokratisasi di negeri Nusantara alias kepulauan terbesar di dunia. Apalagi berharap gerakan perempuan akan memasukkan gerakan lesbian menjadi bagian dari gerakan perempuan secara keseluruhan. Penulis berangkat sebagai aktivis mahasiswa, mimpi bisa punya gerakan mahasiswa seperti di Cina yang bikin aksi di Tiananmen tahun 1988, yang menggegerkan dunia. Ketika teman-teman mahasiswa dari ITB⁶⁴ ditangkapi secara masif Agustus 1989⁶⁵ dan dijebloskan ke penjara, mimpi itu setengah runtuh. Baru satu dekade kemudian dapat membuat runtuhnya rezim otoriter tersebut, awalnya dengan “Demo Susu” Suara Ibu Peduli pada Februari 1998, kemudian bergabung untuk mendirikan Koalisi Perempuan Indonesia Mei di tahun sama (Lihat juga catatan akhir no.63). Membangun gerakan lesbian bukan mimpi, melainkan “dijeburin” dan kadung basah, sekalian saja berenang dari pada tenggelam.

Adalah Rosawita⁶⁶ yang bermimpi untuk mengorganisir lesbian, sejak berdirinya ALN/Asian Lesbian Network di tahun 1986⁶⁷, dan saling kontak dengan Anchana Suwanananda atau Tang, salah satu pendiri ALN, yang mendirikan bersama Naeko Wakabayashi dan June Chan. Ketiga pendiri ALN ini adalah feminis aktivis perempuan yang meletakkan dasar lesbian Asia sebagai politis dan ikatan kultural yang dapat saling menguatkan di dalam maupun di luar Asia (lihat juga: Gurning 2003)⁶⁸. Organisasi ini adalah organisasi LGBT pertama di Asia yang politis, bahkan jauh sebelum para aktivis LGBT laki-laki bertindak politis di dalam Asia. Ketiga pendiri ini sudah melihat ke tahun 1995, ke Beijing, pada saat mendirikan, dengan merancang konferensi setiap dua tahun sekali sebagai bagian dari dinamisasi gerakan lesbian di dalam Asia. Konferensi pertama di Bangkok Desember 1990. Konferensi kedua, April 1992 di Saitama, Jepang. Pada konferensi ini yang dihadiri oleh paling banyak peserta baik dari dalam Asia maupun dari luar Asia, sayangnya (*unfortunately*) perbedaan pandangan antara ALIA dengan ALOA menajam⁶⁹ (untuk kepanjangan ALIA dan ALOA, lihat Cat. Akhir no.67). Konferensi ketiga, Juni 1995, di Wulai, Taiwan, lalu keempat 1997 di Seoul, Korea, dan terakhir 1999 di Filipina bersamaan dengan pembentukan ILGA-Asia⁷⁰. Salah satu hal yang

menarik untuk penulis ungkap di sini adalah, keberhasilan ALN menyelenggarakan konferensinya hingga yang keempat dengan “self-funded” (mendana diri sendiri), yang mayoritas didapat dari keuntungan usaha (*business venture*) sebagai upaya untuk penggalangan dana. Jadi tidak tergantung pada lembaga dana atau donor. Suatu hal yang belum menjadi kesadaran para aktivis Ornop disini, bahwa “self-funded” itu penting untuk dapat membebaskan diri dari kontrol dan “petunjuk” donor, karena “money-talks”. Atas alasan cara-cara pendanaan inilah, penulis berhasilkan meyakinkan pleno konferensi ILGA, di Barcelona tahun 1993, untuk mengesahkan isu soal regionalisasi⁷¹.

Rosawita tidak berhasil hadir pada konferensi perdana ALN, namun dia aktif untuk berjejaring dengan beberapa lesbian yang menjadi kontak dari Gaya Nusantara. Bentuk berjejaring ini adalah melalui surat menyurat, belum ada internet dan ‘gajet’ untuk mengakses sosmed⁷² jaman itu, selain kontak yang ada terpecah-pecah di berbagai kota. Terima kasih kepada jawatan pos saat itu yang mendorong masyarakat untuk surat-menyurat. Rosawita sendirilah yang menjawab surat-surat tersebut, satu-persatu⁷³. Hadir di Saitama, konferensi kedua, tapi masih belum berhasil membuat organisasi. Pulang dari Saitama, dia bertambah gelisah, dan menjawab surat Dede Oetomo tahun 1989 “Lesbian Indonesia : Di Mana Kalian”⁷⁴ dengan “Di mana para lesbian Indonesia”⁷⁵, dengan penjelasan soal penindasan perempuan (dalam konteks ideologi feminisme). Pada periode itulah Rosawita mengajak Djuna⁷⁶ dan penulis untuk membentuk CK/Chandra Kirana (lihat: Gurning 2003), mengambil nama tokoh kisah panji Chandra Kirana⁷⁷ (lihat juga: Gayatri 1997 dan 1993), yang terbentuk kira-kira akhir tahun 1992. Proses yang lama untuk mengonsepan apa yang terbaik yang bisa dilakukan, mengingat realitas sosial yang ada untuk para lesbian: terisolasi; sendirian; tidak tahu harus berbuat apa untuk orientasi seksualnya; merasa bersalah dan berdosa; tidak tahu bisa bertanya atau mengadu ke siapa. Dari proses beberapa bulan lahirlah buletin “Gaya Lestari” yang kadang-kadang bisa disisipkan di dalam buletin GAYa Nusantara.

Mencoba bekerja sama dengan KKLGN⁷⁸ bukannya tidak ada kendala, karena pengorganisasian yang dilakukan cenderung stereotip pada ranah seksualitas lelaki (*male-sexuality*) yang patriarkis dan “jalanan”. Kegiatan pengorganisasian umumnya dilakukan pada waktu malam hari dan kebanyakan

di jalanan atau kadang-kadang di klub-klub malam atau diskotek, yang biasa disebut ajang “ngeber”⁷⁹. Sementara bagi perempuan, --dan perempuan yang mau dianggap “baik-baik”--, secara budaya di masyarakat ranahnya adalah domestik (*domestic sphere*) bukan di ruang publik (*public sphere*). Sekali-sekali mungkin bisa turut melakukan pengorganisasian, namun tidak bisa setiap kali. Kendala ini, tampaknya, kurang disadari untuk para lelaki yang secara budaya mendapat privilese untuk berada di ruang publik. Isu yang diusung banyak organisasi LGBT laki-laki pada saat itu adalah HIV/AIDS --akibat “donor-driven”--, isu yang memang tidak tepat juga untuk LGBT. Beberapa kawan yang turut mengonsepan arah Chandra Kirana yang *aware* dengan isu feminisme dan afirmasi terhadap perempuan keberatan. Ditambah kejadian ketika kongres KKLGN di Bandung, dimana para lesbian tidak bersedia datang, karena susunan acara hanya berorientasi pada yang laki-laki saja. Dari situasi seperti inilah tercurah surat keprihatinan Bunga Jeumpa, di atas. “Kanan nggak oke, kiri juga nggak oke”. Mau bergerak bersama gerakan LGBT laki-laki, masalah mendasar subordinasi dan represi terhadap perempuan tidak dipahami. Mau bergerak bersama gerakan perempuan, para aktivis perempuan sibuk “Off Our Back”.

Bagi siapa yang hadir dalam kongres pembentukan Koalisi Perempuan Indonesia, di penghujung tahun 1998, di Yogyakarta, mungkin tidak akan lupa kehebohan demi kehebohan dari mulai dari hari pertama hingga hari terakhir. Bahwa sebagian, kalau tidak mau dikatakan hampir separuh peserta, meninggalkan ruang sidang pleno, di hari kongres dibuka, karena dalam *keynote speech* (atau pidato kunci kongres) mengangkat isu Gerwani dan memberi ruang kepada ibu Sulami (tokoh Gerwani) untuk berbicara. Pembentukan Koalisi Perempuan Indonesia memang kontroversial karena mengelaborasi isu-isu yang selama rezim ORBA dipinggirkan, dimarginalisasikan, ditindas, dibuat menjadi ‘momok-hantu’ yang harus dihindari oleh rakyat yang patuh dan perempuan “baik-baik”, dengan mengakomodasi isu seperti: Gerwani; pekerja seks; dan seksual-minoritas⁸⁰ atau LGBT. Kemudian debat berkepanjangan soal bentuk federasi atau koalisi.

Bagi penulis, meski turut dalam proses persiapan pembentukan Koalisi Perempuan sejak bulan Mei 1998, tidak pernah bermimpi gerakan LGBT bisa termaktub dalam gerakan perempuan secara

nasional, meski ini mungkin mimpi dari banyak lesbian yang menjadi aktivis perempuan di berbagai daerah di Nusantara. Adalah Ratri M., yang menulis di secarik kertas kecil agak 'kucel'⁸¹, kata "lesbian", untuk sektor yang harus diakomodasi oleh bakal organisasi ini. Ketika masuk agenda untuk mengakomodasi isu-isu apa saja yang perlu dikelola oleh bakal organisasi, maka tiga isu kontroversial tersebut termasuk yang diusulkan. Sektor "seksual-minoritas" atau "sektor lesbian" menjadi isu terakhir yang dipanggil untuk diresmikan. Pada panggilan pertama, ketua sidang Nursyahbani Katjasungkana, masih bersikap netral, melihat kepada seluruh ruang pleno. Penulis duduk diapit oleh Yang Suwan dan Ita Fatia Nadia, yang dengan serta merta mendorong-pendorong penulis untuk maju. Penulis berdiri, melihat kepada beberapa aktivis yang berusia lebih tua dari penulis, tetapi pandangan mereka dingin. Ketua sidang memanggil untuk kedua kali, beberapa peserta yang tidak setuju mulai berteriak menolak, suasana jadi gaduh nyaris mengundang interupsi yang kontra, sementara yang berkepentingan tetap tidak ada yang berani maju. Nursyahbani sambil menutup 'mike' pengeras suara, memanggil-manggil penulis: "...Gay, kamu maju Gay!". Kedua teman yang duduk disamping kiri-kanan penulis mengangkat dan mendorong, sambil mereka berkata, ayo maju!⁸². Penulis keluar dari deretan bangku, berdiri di ujung deretan, memandang kepada Sigit⁸³ yang sedang berdiri di pintu. Sigit menggeleng. Memandang kepada seorang kawan dari Surabaya yang duduk di belakang, dia diam saja. Melangkah sedikit maju, dimana Djuna, salah seorang pendiri CK duduk, menatap untuk mengajak maju bersama. Djuna menggeleng. Akhirnya penulis maju ke podium para pimpinan sidang, merasakan beribu label ditancapkan di punggung dari para peserta kongres yang tidak setuju, menerima map dan kertas kucel itu sebagai presidium sektor lima-belas, Nursyahbani mengetok palu, jadilah sektor seksual-minoritas masuk dalam Koalisi Perempuan Indonesia. LGBT resmi masuk menjadi bagian dari gerakan perempuan, dengan segala pro-kontra dalam dingin.

Menjelang rapat para presidium untuk menentukan Sekretaris Jendral pertama, penulis menemui Sigit, pendiri Perlesin⁸⁴, memberi mandat untuk menjadi presidium pengganti sektor lima-belas. Sigit setuju saja. Setelah rapat presidium dibuka, sebelum pemilihan pimpinan rapat, penulis memohon maaf sebesarnya kepada para presidium yang lainnya untuk menyerahkan mandat presidium

sektor lima-belas kepada Sigit dengan dua alasan. Alasan pertama, soal integritas sehubungan dengan jenis pekerjaan penulis yang dikemudian hari akan menyulitkan gerak organisasi. Kedua, karena penulis tidak dapat membangun sebuah gerakan sendirian. Tanpa voting, tanpa aklamasi sidang presidium menyetujui saja. Penulis menyerahkan map dan kertas kepada Sigit sebagai simbol penyerahan mandat. Setahun berikutnya, alasan pertama terbukti, ketika penulis bekerja untuk USAID⁸⁵ proyek penguatan masyarakat sipil. Dimana proyek ini memberikan bantuan hibah kepada Ornop, termasuk Koalisi Perempuan Indonesia.

Perihal "dijeburin" itu karena, seharusnya Rosawita yang pergi ke Barcelona untuk konferensi ILGA-1993 dan penulis pergi ke Meksiko atas undangan Wieringa untuk ikut Kongres Antropologi Internasional untuk mempresentasi hasil penelitian sejarah lesbian di Jawa (Gayatri 1993). Sampai sebulan sebelum konferensi dia belum juga mendaftar dan ternyata dia urung pergi, sementara kontrak dengan lembaga dana sudah disepakati. Lembaga dana meminta penulis menggantikan. Saat konferensi, salah satu agenda ILGA yang sudah empat kali diagendakan namun selalu *deadlock* adalah soal isu regionalisasi. Kalau pada pengajuan kelima ini masih tidak disepakati, maka agenda ini harus ditunda setidaknya dua tahun. Agenda konferensi ILGA mengikuti cara dan struktur persidangan di PBB. Sanggahan yang selalu berhasil membuat *deadlock* adalah soal pendanaan, karena tidak cukup banyak LGBT dari luar Eropa Barat dapat meyakinkan sidang pleno soal pendanaan ini. Sebagai gambaran ILGA saat itu sangat berpusat dan berorientasi Eropa Barat saja dan mendapat kritik dari anggota ILGA di luar Eropa Barat, meski tidak ada yang bisa memengaruhi peserta dari Eropa Barat soal pendanaan ini. Penulis datang berbagi pengalaman dari Asian Lesbian Network seraya menantang (*challenged*) para peserta sidang pleno dari seluruh dunia. Jika lesbian di Asia, bisa menggalang dana (*fundraising*) mengapa regional lain seperti Amerika Utara (A.S.; Kanada dan Meksiko), atau regional Amerika Selatan yang negaranya tidak semiskin negara-negara di Asia (kecuali Jepang) tidak bisa bikin konferensi regional?

Kampanye regionalisasi mengikuti struktur bertingkat sidang, dari tingkat kelompok (*group*), tingkatan berikut adalah kelas (*class*). Berikutnya lagi adalah sidang komisi (*commission*) yang jika disepakati bersama, naik ke tingkat semi-pleno (*semi-plenary*). Kemudian akhirnya ada di sidang pleno (*plenary*).

Sejak dari kampanye di tingkat kelas, Julie Dorf yang saat itu adalah Direktur Eksekutif IGLHRC (sekaligus pendiri) sudah mendampingi penulis berkampanye regionalisasi. Organisasi-organisasi di Amerika Serikat punya kepentingan dengan regionalisasi ini, sebagai negara tempat PBB berada. Layaknya semboyan “vini-vidi-vici”, aku datang-aku melihat-aku menang, itulah yang terjadi, juga berkat “diplomasi kretek”. Isu regionalisasi diterima dengan suara bulat pada konferensi ILGA tahun 1993 di Barcelona.

Usai konferensi, Dorf meminta penulis datang ke markas IGLHRC di San Francisco untuk kemungkinan bantuan yang IGLHRC bisa harapkan. Penulis diminta magang selama berada di kota “Mekkah”nya LGBT, mempelajari struktur advokasi internasional, khususnya untuk PBB. Seminggu magang, di hari akhir magang sekaligus hari terakhir di kota ini, diminta hadir dalam rapat, hingga nyaris ketinggalan pesawat. Di hadapan staf IGLHRC, penulis diminta untuk menjadi anggota penasihat internasional. “Kami tidak punya wakil lesbian dari Asia-Pasifik, kami harap Gayatri bersedia.” begitu Dorf meminta. Maka jadilah penulis sebagai satu-satunya perempuan dari Asia-Pasifik, sementara laki-laki dari Asia ada dua. Tahun 2001, sepuluh tahun setelah Dorf mendirikan IGLHRC, organisasi ini mengubah struktur dan pindah dari San Francisco ke New York, agar lebih dekat demi mengadvokasi ke PBB.

Penutup

Feminisme, dengan gelombang pemikirannya hingga yang ketiga ini, bukan hanya sekadar budaya Barat vis-a-vis dengan Patriarki, yang merupakan bagian dari konstruksi kebudayaan yang mengglobal. Sehingga ketika feminisme hadir untuk membongkar pola-pikir dan hegemoni konstruksi sosial yang patriarkis ini, ia hadir untuk membongkar dan mentransformasi budaya yang tidak setara ini. Perlunya dibedakan antara kata “gender” yang digunakan secara operasional untuk program-program bantuan pembangunan yang menciptakan salah kaprah dalam pemahaman, dengan istilah atau terminologi “Gender” dalam konteks “Gender dan Seksualitas”. Terdapat dua hal untuk advokasi SOGIE ini. *Pertama* untuk perubahan dan perbaikan Undang-undang sedang terus terjadi di negeri Nusantara yang bhineka ini, misalnya melalui rancangan perubahan KUHP yang saat ini sedang berlangsung, yang akan mengkriminalisasi LGBTIQ, entah karena alasan panik moral atau apa. Dalam kerangka ini

para akademisi atau ilmuwan profesi dan kelompok agama yang homofobik juga perlu dicermati, karena pendapat atau pandangan mereka, terlebih jika mereka-mereka ini diminta untuk membuat naskah akademis untuk perubahan Undang-undang. *Kedua*, negeri ini memiliki kekayaan “Keberagaman Gender dan Seksualitas” (lihat juga Davies 2007), namun aktivis LGBTIQ, termasuk aktivis perempuan hampir tidak ada yang menggali kekayaan ini, sehingga kita tidak mengenali dan kemudian menjadi terasing dari akar-budaya sendiri.

Meskipun negeri ini mempunyai kekayaan “Keberagaman Gender dan Seksualitas”, penulis harus setuju dengan Davies dan Bennet, bahwa Indonesia jelas sebuah contoh negara yang heteronormatif (Davies-Bennet, 2015), tidak terkecuali para aktivisnya. Untuk itu, perlu terus-menerus, dengan tekun mengangkat keberagaman gender sebagai edukasi publik dan mengisi ruang pewacanaan yang berangkat dari budaya sendiri. Pada sudut ini juga untuk menunjukkan bahwa keberagaman gender dan seksualitas ini bukan berasal dari “Barat”. Malahan sebaliknya, yang “Barat”lah yang belajar dari Nusantara ini. Edukasi publik ini termasuk kepada pranata-pranata sosial dan birokrasi yang ada. Upaya ini dapat merupakan bagian dari merekonstruksi dan mentransformasi sosial.

Belajar dari bagai produk hukum yang transformatif, seperti yang terjadi di Kanada untuk “Gender Equality Law” (Undang-undang Kesetaraan Gender), yang diupayakan lebih dari lima belas tahun. Transformasi sosial melalui Undang-undang bukannya tidak mungkin terjadi di bumi Bhinneka Tunggal Ika ini. Alasan-alasan di atas dapat merupakan prasyarat dan prakondisi untuk perubahan paradigma berpikir. Termasuk juga mengedukasi baik para aktivis LGBTIQ sendiri maupun aktivis yang lainnya dengan narasi pewacanaan “Danger-Pleasure” dari gelombang ketiga feminisme. Tanpa pencerahan itu, agensi patriarki dengan ujaran-ujaran kebenciannya dan penyebaran ketakutan [akan seks-positif] masih akan terus berlangsung.

Ucapan Terima kasih

Untuk Tisa dan Terima-Kasihku untuk dukunganmu selalu, khususnya saat mempersiapkan makalah ini.

Daftar Pustaka

- Blackwood, Evelyn & Saskia E. Wieringa, eds., "Female Desire; Same-Sex Relations and Transgender Practices Across Cultures", Columbia University Press, New York, 1999.
- Bennet, Linda Rae and Sharyn Graham Davies, eds., "Sex and Sexuality in Contemporary Indonesia; Sexual Politics, Health, Diversity and Representations", Routledge, London and New York, 2015.
- Boston Women's Health Collective, "Our Bodies, Ourselves", Simon and Schuster, New York, 1973.
- Bunch, Charlotte, "Lesbian in Revolt", in *The Furies; Lesbian/Feminist Monthly*, Vol.1, January 1972, page 8 (bisa diakses ke: <http://scriptorium.lib.duke.edu/wlm/furies/>).
- Butler, Judith, "Gender Trouble", Routledge, London and New York, 1990.
- Cossmann, Brenda, "Sexuality, Queer Theory, and "Feminism After": Reading and Rereading the Sexual Subject", *McGill Law Journal*, 2004 (tanpa diketahui kota publikasi, karena penulis mendapatkan dalam bentuk pdf dari perpustakaan graduate-school, UBC/University of British Columbia).
- Davies, Sharyn Graham, "Challenging Gender Norms: Five Genders among the Bugis in Indonesia", Thomson Wadsworth, Belmont, 2007.
- Foucault, Michel, "Ingin Tahu Sejarah Seksualitas" (terjemahan dari "La Volonté de Savoir; Historie de la Sexualité, tome I"), Yayasan Obor Indonesia, FIB Universitas Indonesia dan Forum Jakarta-Paris, Jakarta 2008.
- Foucault, Michel, "The History of Sexuality; an Introduction (volume 1)", Penguin Books, New York, 1978.
- Gayatri, BJD., "[Come] Outed but Remaining Invisible: A Portrait of Lesbian in Jakarta", unpublished manuscript, Jakarta, 1997.
- _____, "Indonesian Lesbians Writing Their Own Script: Issues of Feminism and Sexuality", in Reinfelder, ed., "Amazon To Zami; Towards a Global Lesbian Feminism", Cassel, London-New York, 1996, p. 86-97.
- _____, "Coming Out but Remaining Oppressed: Lesbian in Indonesia, a Report for Human Rights", Paper for International Gay and Lesbian Human Rights Commission, Global Lesbian Rights Report, Jakarta, 1995.
- _____, "Coming Out but Remaining Hidden: A Portrait of Lesbians in Java", paper presented at the International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, Mexico City, Mexico, 1993.
- Gurning, Agnes Theodora, "Organisasi Lesbian dan Aktivasnya Sebagai Wujud Gerakan Sosial: Studi Kasus Empat Organisasi Lesbian di Jakarta", skripsi sarjana Sosiologi, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas Indonesia, Depok, 2003 (skripsi tidak diterbitkan).
- Hooykass, Dr. C., "Pendéta Bantji Bangsa Toradja", in "Zakelijk Proza in Bahasa Indonesia", J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V., Groningen-Batavia/Djakarta, 1949, hal.11-15
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, edisi keempat, Jakarta, 2011.
- Kieven, Lydia, "Menelusuri Figur Bertopi dalam Relief Candi Zaman Majapahit; Pandangan Baru terhadap Fungsi Religius Candi-candi Periode Jawa Timur Abad ke-14 dan ke-15", EFEO-KPG, Jakarta, 2014.
- Kohlberg, Lawrence, "Essays on Moral Development", Harper and Row, San Francisco, 1981
- Kohlberg, Lawrence and Dorothy Z. Ullian, "Stages in the Development of Psychosexual Concepts and Attitudes", in Richard Friedman et.al., "Sex Differences in Behaviour", John Wiley and Sons, New York, 1974.
- Lanur, Alex, "Logika Selayang Pandang", Kanisius, Yogyakarta, 1983.
- McGee, R. Jon and Richard L. Warms, "Anthropological Theory: An Introductory History", New York, McGraw Hill, 2011.
- Morgan, Robin, "Sisterhood is Powerful", Vintage, New York, 1970.
- Murray, Alison J., "Let Them Take Ecstasy: Class and Jakarta Lesbians", Murray, in Blackwood-Wieringa 1999, hal 139-154.
- Poerbatjaraka, R.M.Ng., "Tjerita Pandji dalam Perbandingan". Diterjemahkan oleh Zuber Usman, Gunung Agung, Djakarta, 1961.
- Reinfelder, Monika, ed., "Amazon To Zami; Towards a Global Lesbian Feminism", Cassel, London-New York, 1996.
- Reinharz, Shulamit, "Feminist Methods in Social Research", Oxford University Press, Oxford, 1992.
- Roberts, Helen, ed., "Doing Feminist Research", Routledge Kegan Paul, London and New York, 1981.
- Rosenbloom, Rachel, ed., "Unspoken Rules; Sexual Orientation and Women's Human Rights", International Gay and Lesbian Human Rights Commission, San Francisco, 1995.
- Sedgwick, Eve Kosofsky, "Epistemology of the Closet", University of California Press, Berkeley, 1990.
- Sedgwick, Eve Kosofsky, "Tendencies", Durham: Duke University Press, 1993.
- Sulistyowati, Endah, ed., "Hegemoni Hetero-Normativitas; Membongkar Seksualitas Perempuan yang Terbungkam", Kartini Network, Jakarta 2007.
- Trumbach, Rudolph, "London's Sapphists: From Three Sexes to Four Genders in the Making of Modern Culture", in G. Herdt, ed., "Third Sex, Third Gender: Beyond Sexual Dimorphism in Culture and History", Zone Books, 1994, p. 111-136.
- Vance, Carole S., "Pleasure and Danger; Exploring Female Sexuality", revised edition, Pandora Press, London, 1992.
- Winterson, Jeanette, "Sexing the Cherry", Vintage, London, 1989.
- Wieringa, Saskia, "Desiring Bodies or Defiant Cultures: Butch-Femme Lesbian in Jakarta and Lima", in Blackwood-Wieringa 1999, hal 206-226.
- Wieringa, Saskia. 1987. "Uw toegenegen Dora D.", ("Tertanda Dora D."), Amsterdam: Uitgeverij Furie., 1987.
- Wittig, Monique, "The Straight Mind and Other Essays", Beacon Press, Boston, 1992.

Koran, Majalah, Berkala

- The Guardian, 2nd April 2014. "Neither male nor female - a great victory for Norrie". <http://www.theguardian.com/commentsfree/2014/apr/02/ neither-male-of-female-a-great-victory-for-norrie>.
- The Guardian 16th April 2014 – Hijra - "Hijra: India's third gender claims its place in law". <http://www.theguardian.com/society/2014/apr/16/ india-third-gender-claims-place-in-law>.
- The Jakarta Post, May 27, 2009: "When a Phobia Becomes the Social Norms". <http://www.thejakartapost.com/news/2009/05/27/ when-a-phobia-becomes-social-norm.html>.
- Graham, Sharyn, "Sulawesi's Fifth Gender", in *Inside Indonesia*, Edition 66, April–June 2001.
- Jeumpa, Bunga, "Quo Vadis, Lesbian?", in *Inside Indonesia*, Edition 66, Apr-Jun 2001. <http://www.insideindonesia.org/quo-vadis-lesbians?highlight=WyJidW5nYSIsImpldW1wYSIsImpldW1wYSdzIwiYnVuZ2EgamV1bXBhIl0%3D>

Film

- National Geographic, "Science of Gender", TV program, documentry, 2010.
- National Geographic, "Taboo: The Complete First Season", 2

volumes, TV Program, documentary, 2004.

Link

Gender, asal kata: <https://en.wikipedia.org/wiki/Gender>.

The Honourable Madam Justice Rosalie Silberman Abella, Keynote Address. http://www.wmst.ubc.ca/pdfs/Abella_Nov6.pdf
[catatan: dulu link ini bisa diakses. Dikarenakan perubahan struktur institusi CWAGS (Centre for Women and Gender Studies) dan RAGA (Race Autobiography Gender and Age) Studies di dalam Faculty of Inter-diciplinary Studies – University of British Columbia, maka link saat ini tidak dapat diakses].

Catatan Belakang:

- 1 Sulit mengakses juga karena disebabkan faktor keterbatasan bahasa asing ataupun kemalasan membaca.
- 2 SOGIE-HAM kependekan dari Sexual Orientation, Gender Identity and Expression atau Orientasi Seksual, Identitas dan Ekspresi Gender. SOGIE ini adalah singkatan baku yang digunakan untuk advokasi HAM di tingkat ASEAN pada saat ini. Penulis memilih singkatan SOGIE, bukan Bahasa Indonesianya, karena belum ada standarisasi penggunaan singkatan dalam Bahasa Indonesianya. Sementara HAM singkatan untuk Hak-hak Asasi Manusia. SOGIE-HAM ini biasanya lebih merujuk pada gerakan untuk mengadvokasi HAM untuk SOGIE. Selanjutnya penulis akan menggunakan kependekan ini.
- 3 Lihat: Reinhartz 1992 dan Roberts 1981
- 4 KBBI (2011), hal. 1245.
- 5 Banyak kasus-kasus eksperimen seksual/seksualitas dalam bidang kedokteran --yang pada saat ini juga bisa didapatkan melalui internet--, yang menunjukkan hal tersebut, seperti eksperimen Kinsey mengenai derajat heteroseksualitas menuju ke derajat homoseksualitas yang sudah banyak dibicarakan dan diulas tersebut, termasuk eksperimen dr. John Money. Namun pada hakikatnya eksperimen dan studi mereka-mereka itu hanya merupakan upaya untuk mengembalikan seseorang yang nonheteroseksual menjadi tunduk dan confirm dengan heteroseksualitas. Dimana para dokter tersebut --mungkin-- tidak berpikir bahwa hal tersebut merupakan kekejaman dan melawan asasi manusia/HAM. Lihat diskusi selanjutnya.
- 6 Kajian dr Money juga merupakan hasil dari eksperimen dia tentang interseks dan individu yang dipaksa untuk melakukan operasi kelamin dan diperlakukan ("treatment") dengan peranan gender. Penelitian ini, menurut hemat penulis adalah mengerikan dan merupakan kekejaman.
- 7 Seperti misalnya yang dilakukan oleh Simone deBeauvoir sejak '60an, lalu Monique Wittig di '70an, kemudian Eve K. Sedgwick dan Judith Butler di satu setengah dekade belakangan ini.
- 8 DSM ini, di Indonesia diadopsi dengan nama PPDGJ, kependekan dari: Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa). Penulis sengaja menggunakan acuan dari DSM ketimbang acuan PPDGJ, karena kelambanan dan keengganan pihak asosiasi profesional di Indonesia untuk bukan hanya mengadopsi namun juga mengimplementasi DSM-DSM yang sudah ada. (Lihat juga pernyataan Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono: <https://www.facebook.com/himpsi/posts/10200193548511314>, sebagai rujukan).
- 9 Penulis sengaja menuliskan ApA-American Psychiatric Association dengan "p" kecil, untuk membedakan dengan APA yang American Psychologist Association. Dalam kenyataannya keduanya dengan "p" besar.
- 10 Lihat juga link: <http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=17761>, bagaimana tuduhan bahwa banyak psikiater yang gay, sehingga DSM III, DSM IV, DSM V, dengan segala tambahannya perlu dipertanyakan. Pada kapasitas intelektual yang sama, penulis juga mempertanyakan, mengenai homofobia yang diidap oleh para professor-dokter tersebut, serta

penyebaran epidemi kebencian dan ketakutan terhadap nonheteroseksual (*Spreading epidemic of hatred and epidemic of paranoia*). Lihat footnote no.11, sebelum ini.

- 11 KUHP ini setara dengan *Penalty-Code*, atau dasar Hukum-Kriminal/Hukum-Pidana, untuk Negara-negara Persemakmuran misalnya. Di Indonesia memang belum dibahas secara mendalam, bagaimana hubungan-seksual dapat menjadi ranah (*domain*) dalam Hukum-Pidana ketimbang masuk dalam Hukum-Perdata, misalnya.
- 12 Lihat: Foucault 1978, hal. 105. Atau dalam Foucault (terjemahan dalam Bahasa Indonesia) 2008, hal 135-136. Dalam hal ini, menurut penulis, terjemahan dalam Bahasa Inggris lebih baik dari pada terjemahan dalam Bahasa Indonesia. Keduanya berdasarkan terjemahan dari buku Foucault yang sama "*La Volonté de Savoir; Historie de la Sexualité, tome I*".
- 13 Lihat, Gayatri: "*When a Phobia Becomes the Social Norms*", the Jakarta Post, May 27, 2009. Bisa diakses: <http://www.thejakartapost.com/news/2009/05/27/when-a-phobia-becomes-social-norm.html>
- 14 Pendekatannya disebut konstruksionisme, karena membedah gender dan seksualitas dari konstruksi sosial atau bentukan sosialnya. Bandingkan diskusi dari Wittig dari esai-esainya, seperti: "*One Is Not Born A Woman*"/"Seseorang Tidak Lahir sebagai Seorang Perempuan"; "*The Mark of Gender*"/"Penanda Gender"; "*Straight Mind*"/"Pikiran 'Lempeng'"; dan "*The Category of Sex*"/"Kategori Jenis Kelamin", misalnya (Wittig 1992). Atau narasi Sedgwick dalam bukunya "*The Tendency*"/"Kecenderungan"(1987) yang kemudian dilanjutkan dengan "*Epistemologi of the Closet*" (1990). Atau juga dalam Butler "*Gender Trouble*" (1991) dan "*Undoing Gender*" (2004).
- 15 "nya"/dia yang dimaksud disini adalah perempuan. Disini feminis, tampaknya diidentifikasi sebagai perempuan, entah perempuan biologis saja, entah termasuk perempuan non-biologis. Sebagaimana dapat juga dilihat dari definisi dalam Bahasa Inggrisnya pada catatan akhir sesudah ini.
- 16 Definisi asli: "*Sexuality poses a challenge to feminist scholarship, since it is an intersection of the political, social, economic, historical, personal, and experiential, linking behavior and thought, fantasy and action. For individual, it is the intersection of past, current, and future experience in her own life. That these domain intersect does not mean they are identical, as the danger of developing a feminist sexual politics based on personal experience alone illustrates. We need sophisticated methodologies and analyses that permit the recognition of each discrete domain as well as their multiple intersections. Despite the many interrelationships of sexuality and gender, we do not believe that sexuality is a sub-part of gender, a residual category, nor are theories of gender fully adequate, at present, to account for sexuality*". Sesungguhnya ini definisi campuran antara definisi dari C. Vance dan dari G. Rubin (lihat dalam "*Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality*", hal. 267-310, dalam Vance 1992 juga)
- 17 Perihal kategori jenis-jenis logika ini dapat ditemukan di berbagai buku yang menjelaskan mengenai Logika sebagai ilmu menalar, antara lain pada Alex Lanur "*Logika Selayang Pandang*, atau Poepowardojo "*Logika Ilmu Menalar*", misalnya. tidak akan dijelaskan mengenai hal tersebut disini.
- 18 Lihat juga dan bandingkan teori Perkembangan Moral L. Kohlberg, baik dalam Duska (1983) atau Kohlberg (1981). Sesungguhnya ada juga penelitian bidang medis-neuroscience (medis-ilmu syaraf) dari dr. Vigotsky yang dapat membuktikan bahwa struktur bahasa dan logika bahasa itu berkembang secara bertahap dari tahap paling sederhana (atau konkret) hingga tahap konseptual (atau abstrak). Namun karena beberapa buku tentang penelitian dr. Vigotsky ini ada di gudang buku penulis di Yogya, sehingga penulis tidak dapat menyajikan penelitian menarik dalam bidang medis-kedokteran (*neuro-science*) tersebut untuk menunjukkan bahwa terdapat hambatan dan keterbatasan logika konkret jika hendak memahami sebuah fenomena yang abstrak dan jauh dari konkret, yang telah diidentifikasi oleh bidang ilmu

- syaraf. Dalam hal ini, kemampuan logika abstrak yang berhubungan dengan kajian “Gender dan Seksualitas”. Semestinya juga, bidang medis-kedokteran (*neuro-science*) dapat menjelaskan, mengapa kebencian begitu tertanam dalam syaraf-ingatan para heteronormativ-homofobik tersebut. Bukankah fobia, apapun bentuknya merupakan gangguan kejiwaan?
- 19 Perihal kategori jenis-jenis logika ini dapat ditemukan di berbagai buku yang menjelaskan mengenai Logika sebagai ilmu menalar, antara lain pada Alex Lanur “Logika Selayang Pandang, atau Poepowardojo “Logika Ilmu Menalar”, misalnya. Penulis tidak akan menjelaskan mengenai hal tersebut disini.
- 20 Terjemahan: “Gender dan Pembangunan” atau “Gender dalam Pembangunan”.
- 21 Untuk isu soal GAD atau GID sebagai pengganti dari “Women and Development” (WAD) dan “Women in Development” (WID), maupun soal “Pengaruh-utamaan Gender”, adalah piring analisis yang lain yang tidak mungkin dibahas di ruang yang sempit disini.
- 22 Misalnya, ketika kemudian pada pewacanaan teori feminis mengenai trikotomi antara seks (jenis kelamin) yang biologis itu dengan gender [yang bersifat] psikologis dengan aturan gender (gender role) yang sosial dalam sebuah makalah berjudul “Transsexualism” di tahun 1978.
(op.cit.: <https://en.wikipedia.org/wiki/Gender>)
- 23 Yang dimaksudkan “Barat” disini adalah istilah yang selama ini dikenal, sebagai misalnya filsafat Barat, atau ilmuwan Barat yang di sisi lain adalah “semacam” berhadapan dengan “Timur” atau Asia, atau yang memiliki tradisi keilmuan yang berbeda dari yang “Barat”.
- 24 Lihat: Davies, 2007.
- 25 Artikel Charlotte Bunch bisa diakses di: <http://scriptorium.lib.duke.edu/wlm/furies/>
- 26 Istilah “Political-Correct” juga adalah terminologi yang sering digunakan dalam narasi pewacanaan mengenai sikap-sikap politik-seksual yang melawan terhadap heteronormativitas. Dimana penulis belum menemukan kata-istilah pengganti secara tepat di dalam Bahasa Indonesia.
- 27 Wittig adalah aktivis-seniman yang filosof dari Quebec, Kanada. Sementara Bunch dan Butler antara lain pernah menjabat, masing-masing sebagai anggota Badan Penasihat Internasional (untuk Bunch) dan sebagai anggota Dewan Pengurus (untuk Butler) di IGLHRC sebelum restrukturisasi di tahun 2001, dan markasnya pindah dari San Francisco ke New York.
- 28 “SnM” kependekan dari Sado-Masokisme, yang berarti: Sado adalah kesenangan dari relasi seksual karena kekerasan; dan Masokisme adalah kesenangan dari relasi seksual dengan melakukan kekerasan. Kadang ditulis juga dengan “S/M” atau “S&M”. Sementara, “BnD” adalah kependekan dari “*Bondage and Discipline*” yang berarti “Ikatan dan Cambuk”, yaitu kesenangan atau kenikmatan dari relasi seksual jika diikat dan dicambuk. “SnM/BnD” ini adalah salah satu bentuk relasi seksual, yang memang cenderung kontroversial dalam konteks “Keberagaman Gender dan Seksualitas”, dan telah menimbulkan pro-kontra diantara para feminis sendiri. Untuk keduanya, secara populer sering digunakan singkatan BDSM (*Bondage Discipline Sado Masochism*).
- 29 Tanda petik pada kata “normal” sengaja digunakan, untuk menandakan bahwa kata ini digunakan secara konotatif bukan denotatif, yang berarti: tidak menyimpang. Atau tunduk pada satu aturan patriarki saja?
- 30 Biasanya feminis aktivis non-universitas yang terlibat dalam organisasi non-pemerintah.
- 31 Duet ini memang terkenal untuk upayanya melawan industri pornografi (yang berorientasi pada kebutuhan laki-laki semata). Pemikiran Dworkin dengan tentang pornografi, antara lain, bisa dibaca di “*Pornography: Men Possessing Women*” (Women’s Press 1981). Bisa juga diunduh di: <http://www.feminist.com/wp-content/uploads/2012/08/Pornography-Men-Possessing-Women-Andrea-Dworkin-pdf.pdf>
- 32 Dua dekade “Konferensi Dunia tentang Perempuan ini, dimulai dari Tahun 1975 (Mexico City), lalu konferensi antara tahun 1980 di Kopenhagen, Konferensi ketiga tahun 1985 di Nairobi, dan yang terakhir atau keempat tahun 1995, di Beijing. Bisa juga lihat link:
<http://www.un.org/womenwatch/daw/followup/session/presskit/hist.htm>, <http://www.unsceb.org/content/un-world-conferences-women>, atau di:
<http://www.britannica.com/topic/United-Nations-Decade-for-Women>.
- 33 Atau dikenal juga sebagai feminis-lesbian.
- 34 Lihat: catatan kaki no.16 diatas, untuk beberapa rujukan diskusi mengenai “Gender dan Seksualitas” dari berapa filosof dan feminis.
- 35 Baik kata pengantarnya maupun catatan setelah satu dekade Konferensi Seksual di Barnard, dalam buku hasil konferensi berjudul “*Pleasure and Danger; Exploring Female Sexuality*” (“Kenikmatan dan Bahaya; Mengeksplorasi Seksualitas Perempuan”) kedua-duanya sama-sama tajam, bernas, lugas, cerdas dan pedas, terhadap cara pikir yang patriarkis, yang masih terjadi selama ini. Catatan: penulis kesulitan menterjemahkan secara tepat kata “*pleasure*” ke dalam Bahasa Indonesia, dalam konteks kesatuan istilah “*sexual-pleasure*”. “*Pleasure*” disini --secara konotatif bukan denotatif-harfiah (dalam rangkuman artian kata secara keseluruhan)-- berarti: kenikmatan; pelesir; bersenang-senang/kesuka-citaan; kepuasan dari [hubungan] seksual yang secara sadar dipilih perempuan. Penulis memilih Memilik kata “kenikmatan”, karena berhubungan dengan orgasme dan kenikmatan-seksual perempuan lainnya.
- 36 Vance, 1992, hal. 2
- 37 *op.cit.* hal. 444
- 38 Meski Gayle Rubin turut dalam komite perencanaan konferensi seksualitas di Barnard ini dan menyumbangkan tulisan bernas yang signifikan untuk konferensi ini selain pemikirannya termaktub dalam ulasan pengantar Vance, namun di kemudian hari, dia menyatakan bahwa kajian seksualitas perlu lebih terbebaskan dari [pengaruh] feminisme. Ide serupa juga datang dari Eve K. Sedgwick. Setuju atau tidak setuju dengan lontaran ide-ide tersebut, namun itulah dialektika pewacanaan.
- 39 *op.cit.* hal. 2
- 40 Kata “stensilan”, adalah istilah yang digunakan, secara khusus di Jakarta, untuk mengacu kepada buku cerita erotis. Dulu di masa jaya komik Indonesia, dijual di daerah Globe, di pasar baru. Tempat yang sama sebagai pusat peredaran komik Indonesia dan novel seperti “Ali Topan; Anak Jalanan”. Konon, dengan terbakarnya Globe (“ter” atau “di” itu memang yang selalu rancu) dan lalu terdapat ‘tuduhan’ bahwa terbakarnya adalah kesengajaan agar kelompok konglomerasi buku dapat menghentikan peredaran komik ini dan digantikan dengan peredaran komik impor. Kisah konon ini memang adalah rumor diantara para pemerhati komik. Namun, dengan terbakarnya Globe ini, tampaknya, berhenti juga peredaran stensilan tersebut. Penulis menjadi tahu tentang buku-buku stensilan ini, karena ketika di SMA yang isinya perempuan semua, sering menemani teman-teman berburu stensilan ini.
- 41 Penulis juga kesulitan untuk menemukan kata dalam Bahasa Indonesia yang tepat untuk “*pervert*” dan “*perversion*” ini. Terjemahan diambil dari kamus Echols-Shadily. Penulis sendiri memahami kata tersebut dalam bahasa Jawa sebagai “*nyeleneh-seksual*”.
- 42 Bahkan untuk masuk ke dalam ranah “SnM/BnD” pun seseorang haru belajar dulu. Mirip seperti seseorang yang hendak melakukan olah-raga ekstrim, seperti terjun payung misalnya. Dalam ranah ini, seseorang harus banyak belajar, seperti: belajar kebutuhannya, apa-apa saja relasi “SnM/BnD” yang nyaman untuk dirinya; kemudian, paham “code-of-conduct” atau aturan

- mainnya, serta “dress-code” yang paling nyaman bagi orang tersebut. Ribetnya yang mau nge-seks “SnM/BnD”, ya? Apa yang penulis sampaikan disini, adalah standar prosedur memasuki “SnM/BnD” di A.S., Australia dan Kanada, yang penulis ketahui. Di Jakarta ada juga komunitas “SnM/BnD” ini, tapi komunitas ini sangat tertutup dan penulis belum ada informasi mengenai prosedur pembelajaran “SnM/BnD” disini.
- 43 Penulis sengaja menggunakan kata “kesesatan” dengan tanda petik, sebagai sikap positif terhadap “kesesatan” yang ditawarkan oleh *The Barnard Sexuality Conference*.
- 44 Juga di: Gayatri 1993 atau 1997.
- 45 Kata ini sudah dikenal sejak sebelum tahun 1949 (Hooykaas, 1949). Belum diketahui secara pasti asal kata darimana. Dari bahasa apa atau budaya yang mana. Tapi, kata ini secara luas dipergunakan di Pulau Jawa.
- 46 Umumnya kata ini digunakan pada daerah yang berbahasa Jawa. Namun ternyata, penulis menemukan bahwa kata ini juga digunakan di daerah yang berbahasa Sunda. Teman saya Saraswati Sunindyo mengaku kepada saya, ketika dia tinggal di Yogya, dia diidentifikasi sebagai “wandu”. Hal ini dibenarkan oleh Michael Bodden mantan suaminya, ketika Saraswati tinggal di Yogya.
- 47 Dari judul artikel Trumbach saja, penulis sudah kurang setuju, “*London Sapphists: From Three Sexes to Four Genders in the Making of Modern Culture*”. Lihat diskusi selanjutnya.
- 48 Kata *Sapphist* dimaksudkan untuk para pengikut Sappho, penyair lesbian dari pulau Lesbos di Yunani. Namun kata ini mempunyai arti yang mengejek.
- 49 Penulis menggunakan idiom kata “*sexing*” dari pengertian: membuat [menjadikan objek] seksual. Mengadopsi idiom yang digunakan Jeanette Winterson dalam novelnya “*Sexing the Cherry*” (Winterson 1989). Bandingkan juga (atau sebagai bahan bacaan lanjutan) ulasan menarik mengenai novel ini, “*Gender in Winterson’s Sexing the Cherry*”, di <http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1544&context=clweb>).
- 50 Sesungguhnya, topik mengenai “Gender-Ketiga” ini juga penuh dengan berbagai pro-kontra.
- 51 Definisi dari “Gender-Ketiga” adalah: sebuah kategori dari seseorang sebagai bukan jantan (*male*) maupun bukan betina (*female*). Dari Macmillan Dictionary: ‘*third gender*’, noun [countable/uncountable].
- 52 Khusus untuk alinea ini, penulis berterima kasih untuk diskusi yang bernas dan masukan dari Evi Rozi. Separuh dari kalimat-kalimat di alinea ini penulis ambil dari kalimat-kalimat pernyataannya.
- 53 Lihat: “*Science of Gender*”, National Geographic, 2010
- 54 Kuliah umum dalam ‘*Keynote Address*’ (semacam *studium generale* yang kita kenal) The Honourable Madame Justice Rosalie Silberman Abella pada Centre for Women and Gender Studies (CWAGS), bekerja sama dengan Fakultas antar-disiplin, University of British Columbia, Vancouver, pada tanggal 6 November, 2009. Beliau baru dapat memberikan kuliah umum dan berbagi pengalamannya setelah pensiun sebagai Hakim Agung, karena di Kanada, seorang Hakim Agung dilarang berbicara dan menyatakan pernyataan hukumnya [di muka umum], karena akan dianggap menghina pengadilan. Tidak seperti yang terjadi di Indonesia. Menurut penuturannya juga, banyak negara seperti Australia dan Aotearoa (New Zealand) telah belajar dari konsep hukum kesetaraan gender yang dikonsepkannya. Beliau pensiun sebagai Hakim Agung pada akhir tahun 2006. Sebagai catatan, Undang-undang (hukum) Kesetaraan Gender (*Gender Equality Law*) yang diterima secara aklamasi oleh semua negara bagian di Kanada --meski secara bertahap--, pada tahun 2007. Sebagai catatan tambahan, The Honourable Madame Abella bekerja merumuskan RUU tersebut sejak tahun 1985 dan baru dapat melepaskan jabatan sebagai perumus RUU pada tahun 2005 ketika parlemen Kanada menerima RUU tersebut dan kemudian diteruskan kepada masing-masing pemerintah negara bagian. Setahun setelah RUU berhasil digolkan sebagai UU, maka beliau pensiun sebagai Hakim Agung. Juga sebagai catatan tambahan, pada tahun 1990 batuan dari pemerintah Kanada kepada pemerintah Indonesia melalui CIDA (lembaga bantuan pembangunan dari Kanada) dalam sebuah proyek yang bertajuk “*Women Support Program*” (Program Suport untuk Perempuan), yang berlangsung dalam 2 fase. Program inilah yang membantu pemberdayaan perempuan termasuk dalam program Pengarus-utamaan Gender (*Gender Mainstreaming*) dibawah Kementerian Urusan Peranan Wanita yang kemudian menjeadi Kementerian Negara Perempuan dan Anak. Sebagai proyek bantuan, ini merupakan proyek bantuan pemerintah Kanada demi Kesetaraan Gender di Indonesia, dan merupakan proyek yang mengawali bantuan secara khusus terhadap kesetaraan gender, yang baru disusul oleh bantuan dari pemerintah negara maju yang lainnya satu dekade kemudian. Sayangnya, program ini di tingkat implementasi mengalami banyak kendala pada pelaksanaannya, dimana kendala utama adalah struktur patriarki yang sulit berubah. [Keterangan ini diberikan berdasarkan pengalaman penulis bekerja untuk Women Support Program phase I (pada tahun 1993) dan pada beberapa program bantuan pembangunan pada beberapa donor yang lain]
- 55 “The Australian high court has ruled that New South Wales must recognise a third gender after handing down its decision in the long-running case of Norrie, who has been fighting since 2010 to have a sex change recognised as non-specific.” (The Guardian)
- 56 Lihat juga film dokumenter mengenai *Hijra* ini dari National Geography, “*Science of Gender*”, 2010
- 57 Dalam perjalanan pulang dari Kongres Sungai di akhir Agustus 2015, Eva menyatakan hal tersebut. Kata-kata dalam kalimat terjemahan, adalah keterangan yang penulis tambahkan setelah menanyakan kepada dia, apa maksudnya.
- 58 Atau The 4th World Conference on Women, yaitu: Konferensi Dunia tentang Perempuan keempat, yang diselenggarakan di Beijing, yang merupakan konferensinya yang terakhir. Setelah konferensi pertama di Meksiko, 1975. Konferensi kedua yang merupakan konferensi-antara di Kopenhagen 1980, lalu ketiga di Nairobi, 1985. Lihat juga dokumen: <http://www.un.org/womenwatch/daw/followup/session/presskit/hist.htm>
- 59 Chandra Kirana adalah organisasi Lesbian di Indonesia, yang untuk pertama kalinya mencoba menerobos secara politis, baik di tingkat nasional, regional dan internasional. Dengan bentuknya yang cair, namun berhasil menerbitkan beberapa buletin khusus untuk lesbian. Penerbitan yang terpanjang selama sejarah publikasi untuk lesbian di Indonesia (bandingkan: Gurning 2003; dan Murray 1999).
- 60 IGLHRC: International Gay and Lesbian Human Rights Commission
- 61 Bisa juga diakses di: <http://www.insideindonesia.org/quo-vadis-lesbians?highlight=WyJidW5nYSIsImpldW1wYSIsImpldW1wYSdzIiwuYnVuZ2EgamV1hXBhII0%3D>)
- 62 Untuk informasi mengenai sejarah organisasi lesbian atau tentang Kelompok Kerja Chandra Kirana/KKCK, bisa lihat: Gurning, 2003; Murray, 1999, hal 139-154; Wieringa 1999 , hal 206-226
- 63 Yang penulis tahu, Nursyahbani Katjasungkana dan Tati Krisnawati telah memikirkan untuk membuat Partai Perempuan, berdasarkan data kependudukan. Wacana ini muncul sejak sekitar tahun 1991, ketika penulis bergabung dalam “*Forum Pembela Perkara Perempuan*”, sebuah forum informal bagi aktifis [cikal-bakal] gerakan perempuan, yang berkumpul setiap hari Kamis, di kantor LBH Jakarta, sesudah jam kantor. Forum ini secara umum mengagendakan pembahasan dokumen CEDAW dan beberapa agenda lain. Di tahun ini gerakan perempuan sesungguhnya terbagi dua jenis. Di satu sisi, dan yang agak besar baik dalam jumlah organisasinya maupun dalam skala geografisnya, adalah gerakan pemberdayaan ekonomi bagi

- perempuan, disebut “kelompok ekonomi”. Di lain sisi adalah, kelompok perempuan yang melakukan advokasi kebijakan mengenai perempuan dan kondisi politik lainnya, disebut “kelompok politik” dan melabel “kelompok ekonomi” sebagai kurang politis. [Dalam lokakarya pemetaan “Gerakan Perempuan” yang dilakukan oleh JASS-SEA pada tahun 2009, dengan fasilitator Lies Marcoes soal “kelompok ekonomi” dan “kelompok politik” ini juga muncul juga.]. Pada saat yang bersamaan, penulis juga sedang mempersiapkan berdirinya organisasi perempuan, yang nama informalnya adalah KKPI/ Kelompok Kebangkitan Perempuan Indonesia, bersama Nana Edriana, Linda Gumeulis, Nori Andriyani, Ona Kaplale dan Susana Ramadhani. Kelompok ini kemudian menjadi Yayasan Perempuan Mardhika/YPM, bergerak untuk pemberdayaan buruh, termasuk berhubungan dengan dengan almarhum Marsinah dan membantu mendirikan teater buruh bernama “Teater ABU” (Teater Aku Buruh). Organisasi ini sudah membubarkan diri pada sekitar tahun 1993, namun Teater ABU, menurut Margesti, salah satu pendirinya, hingga sekarang masih ada. Katjasungkana dan Krisnawati, bersama beberapa orang yang lainnya lagi, seperti Tjita Andang Sejati, Ati Nurbaiti dan beberapa orang lainnya mendirikan organisasi Solidaritas Perempuan (dalam bentuk yayasan, yang nantinya akan berubah menjadi bentuk perserikatan), beberapa bulan sebelum YPM terbentuk.
- 64 ITB: Institut Teknologi Bandung
- 65 Terkenal dengan nama “Peristiwa 5 Agustus 1989” di ITB. Dimana mahasiswa membakar ban untuk menolak kehadiran Rudini di kampus tersebut.
- 66 Rosawita bukan nama sebenarnya. Penulis konsisten menggunakan, sejak digunakan pertama kali tahun 1993, untuk menjaga soal apakah dia sudah “coming-out” atau belum.
- 67 ALN didirikan di Belanda tahun 1986 oleh tiga orang yaitu: Tang sendiri (dari Thailand); Naeko Wakabayashi (dari Jepang) dan June Chan (keturunan Asia, tinggal di New York, A.S.). Awalnya ALN terdiri dari tiga network/jaringan, yaitu: ALIA/Asian Lesbian living Inside Asia (Lesbian Asia tinggal di dalam Asia); ALOA/Asian Lesbian living Outside Asia (Lesbian Asia tinggal di luar Asia); dan LALA/Lesbian Affirming Lesbian in Asia (Lesbian [yang] Menguatkan Lesbian di Asia). Tang dan Wakabayashi jelas mewakili ALIA, sementara June Chan mewakili ALOA.
- 68 June Chan sendiri menggunakan dalil dari Virginia Woolf “...as a woman, I have no country...”, ketika mendirikan ALN dengan ALOAnya, yang menurutnya juga politis, selain kultural. Dia menjelaskan panjang lebar konsep politis-kultural yang dia usulkan kepada Tang dan Naeko, ketika mendirikan di Amsterdam 1986. Namun sayang, Chan tidak dapat hadir untuk berdialog dengan Trinity Ordone setahun sebelumnya. Meski sama-sama tinggal di A.S., namun kedua aktivis tidak bisa bertemu, karena Ordone tinggal di pantai Barat dan Chan di pantai Timur (Pertemuan dengan June Chan di bulan Juni 1993, di New York. Lihat catatan akhir sesudah ini).
- 69 June Chan sendiri pada saat itu berhalangan hadir, sementara konsep mendasar yang dipertanyakan Trinity Ordone (San Francisco) dan Annie Ling (Sydney) kepada dua pendiri lainnya Tang dan Naeko tidak berhasil dijembatani, baik oleh pendiri maupun peserta yang lainnya. Konsep mendasar itu adalah dasar advokasi politis yang akan sulit ditembus oleh jaringan ALOA yang di masing-masing negara juga telah mengalami diskriminasi rasial, serta makna kultural dalam gerakan ini. Pertanyaan-pertanyaan mendasar untuk operasional organisasi tidak dapat terpecahkan saat itu, hingga mayoritas jaringan ALOA yang hadir saat itu, menyatakan mundur dari pembangunan struktur dan operasional ALN. Sejak itu, mulai dengan konferensi ketiga, tidak ada ALOA yang hadir secara politis untuk konferensi ALN.
- 70 Penulis kurang jelas alasan pasti pembubaran ALN ini, namun sejak ALN bubar dan seolah tergantikan oleh ILGA-Asia, dimana Anna-Leah Sarabia yang selama ini aktif di ALN, menjadi Sek. Jen ILGA-Asia pertama, sebelum akhirnya struktur kepengurusan diubah.
- 71 Dikenal dengan nama agenda “Regionalisation Issue of ILGA”, karena ILGA selama itu (hingga tahun 1993) hanya berpusat di Eropa Barat, dengan isu-isu Eropa Baratnya saja (*West-European Centered*).
- 72 Memang kata baku yang sekarang digunakan untuk “gadget” yang biasa ditulis sebagai ‘gajet’ adalah “gawai”. Kata dasar dari “pegawai”. Namun penulis sengaja memilih diksi pembantaian dari Bahasa Inggris, yaitu: ‘gajet’. Termasuk memilih diksi ‘sosmed’, yang tidak sesuai kaidah Bahasa Indonesia.
- 73 Di kemudian hari ketika dia mundur dari CK, menjadi tugas penulis. Nasib ya nasib.
- 74 GAYa Nusantara no.10, 1989.
- 75 GAYa Nusantara no.18, 1992. Untuk catatan akhir ini dan ibid., bisa lihat juga Murray 1999 dalam Blackwood-Wiering 1999.
- 76 Djuna, juga bukan nama sebenarnya. Diambil dari nama sastrawan lesbian Djuna Barnes. Alasan yang sama digunakan seperti pada catatan akhir no. 67.
- 77 Kisah panji Chandra Kirana ini adalah kisah yang menggambarkan kedekatan atau kemesraan antara dua orang perempuan. Kisah ini dipercaya sudah ada sejak jaman Mataram-Hindu periode Jawa Timur, namun untuk sementara banyak ahli menyatakan kisah ini adalah bukti kejayaan susastra di periode Majapahit yang menyebar ke berbagai daerah lain di Nusantara, termasuk di Palembang, Jambi hingga Siam dan Kamboja (bandingkan: Perbatjaraka 1962 dan Kieven 2014).
- 78 KKLGN: Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara. KKLGN ini terdiri dari organisasi GAYa Nusantara sendiri, beserta jaringan se-Nusantara.
- 79 “Ngeber” adalah istilah untuk banyak komunitas LGBT laki-laki yang kurang lebih berarti ajang cuci-mata dan mencari pasangan untuk berhubungan seksual.
- 80 Di periode itu, istilah resmi untuk advokasi internasional adalah “seksual-minoritas”, sebelum istilahnya diganti menjadi SOGIE yang tidak berkonotasi terpinggirkan dan lebih netral, di dekade berikutnya, khususnya setelah “The Yogyakarta Principles” diluncurkan di tahun 2006.
- 81 Secarik kertas mungil dan kucel, yang diberikan kepada penulis ketika menerima mandat, oleh pimpinan sidang saat itu.
- 82 Menurut penjelasan Yang Suwan, dia mendorong penulis untuk maju, karena melihat ada kesempatan untuk perubahan. Dimana dia berharap, jika sektor ini ada, setidaknya ada perubahan. “Kalau saat itu tidak ada yang maju, mungkin tidak ada perubahan bagi gerakan perempuan”, jelasnya. TerimaKasih Suwan!
- 83 Bukan nama sebenarnya. Penulis tetap menggunakan bukan nama sebenarnya ini secara konsisten, seperti yang digunakan juga oleh Gurning 2003 dan Wieringa 1999.
- 84 Perlesin kependekan dari Persatuan Lesbian Indonesia. Lihat juga: Wirienga 1999, atau Gurning 2003.
- 85 USAID kependekan dari U.S. Agency for International Development, lembaga donor pemerintah Amerika Serikat untuk bantuan pembangunan kepada negara-negara berkembang.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

- Prof. Mayling Oey-Gardiner
 - Prof. Jeffrey Winters
- Prof. Rachmi Diyah Larasati
 - Prof. Merlyna Lim
 - Dr. Kristi Poerwandari
 - Dr. Ida Ruwaida Noor
 - Dr. Arianti Ina Restiani
 - Dr. Phil. Ratna Noviani
- Tracy Wright Webster, PhD.
 - Sari Andajani, PhD.

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*end-note*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

Catatan Jurnal Perempuan: Mengapa SOGIE (<i>Sexual Orientation, Gender Identity and Expression</i>)?.....	iii
Artikel / Articles	
• Selarung Gerakan Lesbian dalam Epidemi Kebencian: Awal Advokasi SOGIE (<i>Sexual Orientation, Gender Identity and Expression</i>) di Nusantara / <i>Plurality of Lesbian Movements under Hatred-Epidemic: Initiation of SOGIE Advocacy in Nusantara</i>	269-288
<i>BJD. Gayatri</i>	
• Diri, Tubuh dan Relasi: Kajian atas Transgender FTM (<i>Female to Male</i>) di Jakarta / <i>Self, Body, and Relation: a Study of FTM Transgender in Jakarta</i>	289-302
<i>Sri Agustine, Evi Lina Sutrisno & Dewi Candraningrum</i>	
• "Mengapa Saya Mendirikan Suara Kita?" Sebuah Memoar / <i>"Why I founded Our Voice": a Memoir</i>	303-308
<i>Hartoyo</i>	
• Penyebab atau Penyembuh? Kekerasan Seksual terhadap Lesbian, Biseksual, dan Transgender <i>Female-to-Male</i> di Indonesia / <i>Causes or Cures? Sexual Violence against Lesbian, Bisexual and Transgender Female-to-Male in Indonesia</i>	309-314
<i>Ayu Regina Yolandasari</i>	
• Razia terhadap LGBT sebagai Agenda Moralitas Palsu: Kajian Pemberitaan Media di Indonesia / <i>Raids against LGBT as Fake Moral Agenda: a Study on News Media in Indonesia</i>	315-320
<i>Sari Andajani, Dinar Lubis & Sharyn Graham-Davies</i>	
• Politik Gender dan Seksualitas: Transgender Indonesia dalam Konteks Masyarakat Indonesia dan Eropa Barat / <i>Gender Politics and Sexuality: Indonesian Transgender in the Context of Indonesia and Western Europe Society</i>	321-327
<i>Tanti Noor Said</i>	
• Memetakan Tubuh, Gender, dan Seksualitas dalam Kajian Queer / <i>Mapping Body, Gender, and Sexuality in Queer Studies</i>	329-338
<i>Hendri Yulius Wijaya</i>	
• Hak Asasi Manusia LGBT dalam Kebijakan Dalam Negeri Indonesia / <i>LGBT's Human Rights in the Indonesian Interior Policies</i>	339-355
<i>Yulianti Muthmainnah</i>	
• LGBT, Agama dan HAM: Kajian Pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl / <i>LGBT, Religion, and Human Rights: a Study on Khaled M. Abou El-Fadl's Thoughts</i>	357-366
<i>Masthuriyah Sa'dan</i>	
• "Makna Hidup" Bagi LGBT Ketika Negara Abai: Kajian Queer di Jakarta / <i>"Meaning of Life" for LGBT when State Ignores: a Queer Study in Jakarta</i>	367-376
<i>Gadis Arivia dan Abby Gina</i>	
Wawancara / Interview	
• David Kloos: "Perempuan Konservatif Mendominasi Formasi Kepemimpinan" / <i>David Kloos: "Conservative Women dominate Formation of Leadership"</i>	377-381
<i>Saras Dewi</i>	
Kata dan Makna / Words and Meanings	
383-385	
Profil / Profile	
• Hana Salomina Hikayobi: "Terpanggil untuk Menyuarakan Kaum Tak Bersuara" / <i>Hana Salomina Hikayobi: "Compelled to voice the Voiceless"</i>	387-392
<i>Dewi Candraningrum & Anita Dhewy</i>	
Resensi Buku/ Book Review	
• Tombois dan Femmes: Menantang Label Gender di Padang / <i>Tombois and Femmes: Against Gender Label in Padang</i>	393-395
<i>Nadya Karima Melati</i>	
Tokoh / Heroine	
• Tunggal Pawestri: "Dukungan Terbuka terhadap LGBT akan Mengundang Dukungan Yang Lain" / <i>Tunggal Pawestri: "Open Support for LGBT invite Other Support"</i>	397-404
<i>Anita Dhewy</i>	

